

B. KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014

I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

a. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumberdaya alam, kualitas sumber daya manusia, perubahan teknologi, kewirausahaan dan kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (*BI Rate*), kebijakan pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak dan perkembangan situasi perekonomian global.

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Untuk perhitungan PDRB pada tahun 2014 BPS menggunakan 2 metode, yaitu metode lama dengan tahun dasar 2000 ada 9 sektor lapangan usaha, dan metode baru dengan tahun dasar 2010 jumlah sektor lapangan usaha sebanyak 19. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014
Menurut Tahun Dasar 2000 dan 2010

TAHUN	TAHUN DASAR 2000			TAHUN DASAR 2010		
	PDRB ADHB (Milliar Rp)	PDRB ADHK (Milliar Rp)	PERTUMBUHAN (%)	PDRB ADHB (Milliar Rp)	PDRB ADHK (Milliar Rp)	PERTUMBUHAN (%)
2010	778,564.24	342,280.76	6.68	990,649.44	990,648.84	6.31
2011	884,502.64	366,983.28	7.22	1,119,877.16	1,054,401.77	6.44
2012	1,001,200.74	393,662.84	7.27	1,247,767.29	1,124,464.64	6.64
2013	1,136,157.86	419,443.70	6.55	1,382,434.85	1,192,841.86	6.08
2014	1,291,998.78	444,855.71	6.06	1,540,696.53	1,262,700.21	5.86

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel Diatas Perhitungan PDRB baik dengan menggunakan metode lama, maupun metode baru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan atau percepatan, sedangkan tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami perlambatan.

Dengan menggunakan metode lama (tahun dasar 2000) pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2010 sebesar 6,68 persen, tahun 2011 meningkat tumbuh sebesar 7,22 persen dan tahun 2012 mengalami percepatan lagi tumbuh sebesar 7,27 persen. Namun setelah itu yaitu tahun 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 6,55 persen dan tahun 2014 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi menjadi 6,06 persen.

Sedangkan Dengan menggunakan metode baru (tahun dasar 2010) pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2010 sebesar 6,31 persen, tahun 2011 meningkat tumbuh sebesar 6,44 persen dan tahun 2012 mengalami percepatan lagi tumbuh sebesar 6,64 persen. Setelah itu tahun 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 6,08 persen dan tahun 2014 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi menjadi 5,86 persen.

Total nilai Produk Domestik regional Bruto Seri 2010 atas dasar harga berlaku (ADHB) mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2010 sebesar Rp. 990,649 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.540,696 triliun pada tahun 2014. Selanjutnya PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2010 sebesar Rp. 990,648 triliun meningkat menjadi Rp. 1.262,700 triliun tahun 2014.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 dan tahun 2014, merupakan imbas dari krisis global yang berkepanjangan yang mempengaruhi kinerja Perdagangan, Ekspor – Impor Jawa Timur khususnya kinerja ekspor ke luar negeri. Disamping itu tahun 2013 dan tahun 2014 merupakan tahun politik bagi masyarakat Jawa Timur, yaitu tahun 2013 ada pemilihan Gubernur dan beberapa Bupati dan Walikota,

dan tahun 2014 Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Sehingga banyak pelaku usaha yang cenderung menunggu kepastian untuk melakukan aktivitas pengembangan / ekspansi terhadap usahanya.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86 persen di tahun 2014 didukung oleh Pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88 persen, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,52 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,17 persen. Laju pertumbuhan dimasing-masing sektor dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut
Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA		LAJU PERTUMBUHAN	SUMBER PERTUMBUHAN
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,63	0,46
B	Pertambangan dan Penggalian	3,65	0,18
C	Industri Pengolahan	7,66	2,22
D	Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	2,45	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,25	0,00
F	Konstruksi	5,44	0,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	0,85
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	0,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	0,43
J	Informasi dan Komunikasi	6,34	0,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,95	0,18
L	Real Estate	6,97	0,12
M,N	Jasa Perusahaan	8,52	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	0,01
P	Jasa Pendidikan	6,48	0,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,17	0,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,46	0,08
PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO		5,86	5,86

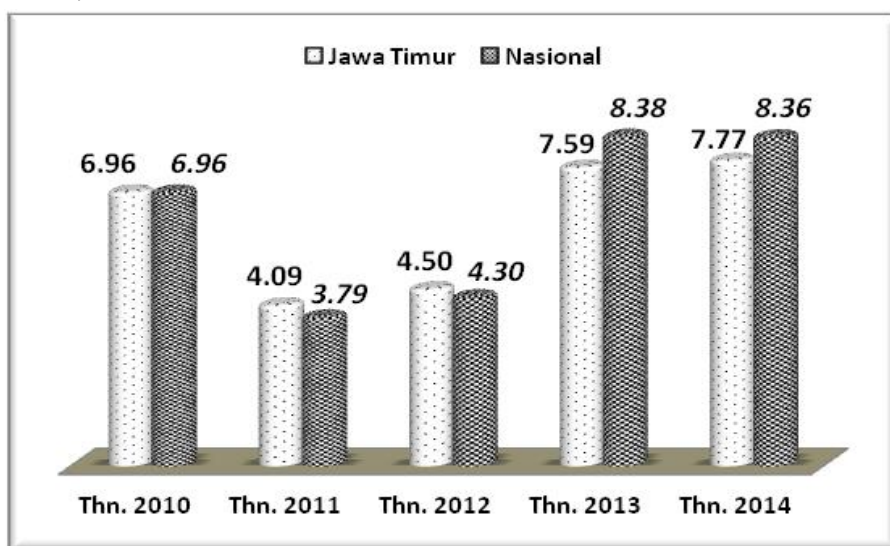
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sedangkan Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: Industri Pengolahan (28,90 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,73 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,24 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2014, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,22 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,85 persen; dan Konstruksi sebesar 0,50 persen.

1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH).

Gambar 4.1
Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) laju inflasi di Jawa Timur cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2010 inflasi Jawa Timur mencapai 6,96 persen, kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 4,09 persen. Selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2012-2014 inflasi terus mengalami peningkatan, yaitu 4,50 persen (tahun 2012), 7,59 persen (tahun 2013), 7,77 persen (tahun 2014). Inflasi Jatim pada tahun 2013-2014 berada di bawah inflasi nasional.

1.3. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB setiap tahun yang semakin meningkat. Perkembangan PDRB perkapita mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010-2014

NO	URAIAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	778.564	884.503	1.001.201	1.136.327	1.291.998
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu jiwa)	37.565,8	37.840,7	38.106,6	38.363,2	38.610,0
3	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	20.725	23.374	26.274	29.620	33.463

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur,

Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PDRB per kapita penduduk Jawa Timur setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 20,72 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 23,37 juta pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012-2014 PDRB per kapita Jawa Timur meningkat masing-masing menjadi Rp. 26,27 (2012) juta; Rp. 29,62 juta (2013); dan Rp. 33,46 juta (2014).

Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Jatim semakin baik.

1.4. Gini Rasio

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat adalah dengan melihat Gini Rasio. Terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan menurut Gini Rasio, tinggi jika nilai koefisien gini rasio sebesar 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,3-0,5 dan rendah jika kurang dari 0,3.

Tabel 4.4
Gini Rasio Nasional dan Pulau Jawa Tahun 2010-2014

PROVINSI	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	0,36	0,44	0,42	0,43	0,44
Jawa Timur	0,34	0,37	0,36	0,36	0,40
Jawa Barat	0,36	0,41	0,41	0,41	0,40
Jawa Tengah	0,34	0,38	0,38	0,39	0,39
Banten	0,42	0,40	0,39	0,40	0,42
DI Yogyakarta	0,41	0,40	0,43	0,44	0,43
NASIONAL	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41

Sumber : BPS RI

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2010-2014 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Selama tahun 2010-2014 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 sebesar 0,34 dan meningkat menjadi 0,37 di tahun 2011, namun pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan sebesar 0.01 poin menjadi 0,36. Sedangkan pada tahun 2014 angka gini rasio di Jawa Timur naik menjadi 0,40. Hal masih lebih baik bila dibandingkan angka gini rasio nasional, angka gini rasio nasional tahun 2010 sebesar 0,38 dan pada empat tahun terakhir bertahan pada angka 0,41.

Angka gini rasio daerah perkotaan selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Nilai gini rasio Jawa Timur pada wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki beda sekitar 10 poin, kondisi ini memberikan gambaran bahwa di daerah perkotaan ketimpangan pendapatan masyarakat cenderung lebih tinggi dibanding daerah perdesaan.

1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Meskipun suatu wilayah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada yang perlu diketahui yaitu seberapa besar kue ekonomi yang terbentuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Bisa jadi kue ekonomi tersebut hanya dikuasai oleh konglomerat yang jumlahnya hanya segelintir orang saja. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Jika yang distribusi pengeluaran penduduk berkategori 40 persen terbawah adalah kurang dari 17 persen, maka wilayah itu dikatakan mempunyai ketimpangan pemerataan pendapatan yang tinggi, artinya kue ekonomi dalam wilayah itu tidak banyak dinikmati oleh masyarakat berpendapatan 40 persen terbawah.

Tabel 4.5
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2014

Tahun	Jawa Timur		
	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
2010	20,81	38,52	40,67
2011	21,09	38,57	40,34
2012	20,15	34,38	45,47
2013	19,82	34,55	45,63
2014	17,18	35,15	47,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

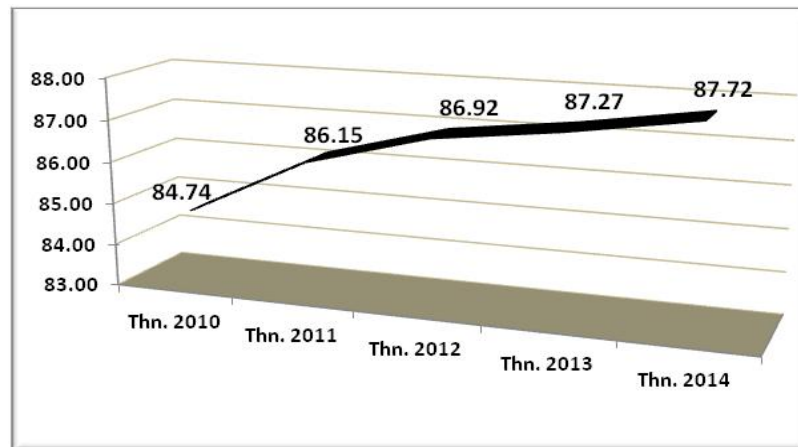
Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank Dunia, menunjukkan bahwa kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori pendapatan 20 persen keatas pada tahun 2010 sebesar

40,67 persen, meningkat menjadi 47,66 persen pada tahun 2014. Untuk kelompok pendapatan 40 persen menengah pada tahun 2010 sebesar 38,52 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 35,15 persen. Selanjutnya 40 persen terbawah di Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 20,81 persen, kemudian menurun menjadi 17,18 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ketimpangan pendapatan 40 persen terbawah di Jawa Timur pada tahun 2014 termasuk dalam kategori rendah.

1.6. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Pembangunan yang dilakukan di setiap daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hasil-hasil pembangunan yang dapat dirasakan akan memberikan dampak yang luas terhadap kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Bukti dari keberhasilan tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk yang berada di atas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan di atas Garis Kemiskinan.

Gambar 4.2
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)
Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama kurun waktu tahun 2010-2014 presentase penduduk diatas garis kemiskinan di Jawa Timur secara berturut-turut mengalami kenaikan dari 84,74 persen pada tahun 2010 menjadi 87,72 persen pada tahun 2014. Sedangkan penduduk miskin mengalami penurunan dari

tahun 2010 sebesar 15,26 persen menjadi 12,28 persen pada tahun 2014.

1.7. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Disparitas Wilayah)

Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkeadilan, disparitas wilayah perlu dievaluasi. Pembangunan yang diharapkan tidak hanya dinikmati oleh wilayah-wilayah tertentu saja, tetapi dampak itu dirasakan hingga wilayah terkecil. Pembangunan yang berkeadilan tidak mengenal dikotomi daerah maju dan daerah tertinggal. Bukan berarti daerah yang berstruktur ekonomi agraris atau sektor primer harus ikut berubah arah struktur perekonomiannya menjadi sektor sekunder atau tersier. Memang kenyataannya untuk sekarang ini, daerah yang perekonomian didominasi sektor sekunder (industri) dan tersier (perdagangan-jasa) relatif lebih maju dibanding berbasis sektor primer.

Tabel 4.6
Indeks Williamson Jawa Timur
Tahun 2010-2014

Indeks Williamson	2010	2011	2012	2013	2014
	115.14	112.68	112.60	112.71	112.69

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Disparitas wilayah akan semakin menyempit, jika roda ekonomi daerah yang maju mampu menjadi pengungkit perekonomian daerah berbasis sektor primer (agraris). Justru kebijakan perekonomian masing-masing daerah menjadi tolok ukur utama terhadap kelangsungan masa depan perekonomian suatu daerah.

Kesenjangan wilayah yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson di Jawa Timur pada lima tahun terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin membaik. Pada tahun 2010 indeks ini tercatat sebesar 115,14 selanjutnya menurun pada tahun 2011-2012 masing-masing 112,68 (2011), 112,60 (2012). Pada tahun 2013 Indeks Williamson melebar tipis menjadi 112,71 dan tahun 2014 kembali menurun menjadi 112,69. Dalam upaya untuk menjaga kestabilan disparitas wilayah ini, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi inflasi

komoditas-komoditas yang dapat memberikan dampak efek multiplier. Kestabilan harga pangan dan energi harus dijaga. Selain itu, perlu ditingkatkan iklim usaha sehat agar pertumbuhan ekonomi tumbuh cepat dan investasi dunia usaha dapat berkembang dengan baik.

Pemerintah Daerah harus mampu mengetahui permasalahan dan kendala ekonomi di masing-masing daerah, dan berupaya mencari terobosan-terobosan baru agar perekonomiannya bisa berjalan tetap dinamis. Infrastruktur-infrastruktur yang dianggap strategis harus menjadi prioritas utama guna mempersempit disparitas antar wilayah.

1.8. Angka Kriminalitas yang tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjadikan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga tidak mengganggu berlangsungnya aktivitas masyarakat. Selain itu penanganan kriminalitas oleh aparat keamanan secara cepat dan tepat sasaran akan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Tabel 4.7
Tindak Kejahatan di Jawa Timur Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Tindak Kejahatan	Tindak Kejahatan Yang Tertangani	Persentase Tindak Kejahatan Tertangani	Angka Kriminalitas Tertangani
2010	16.879	9.892	58.61	2.64
2011	14.991	7.503	50.05	1.99
2012	15.270	9.216	60.35	2.42
2013	14.579	8.530	58.51	2.22

Sumber : Polres Kab/Kota Se Jawa Timur (2009), Polda Jatim (2010-2013)

Berdasarkan data dari Polda Jatim, angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2013 adalah 2,22 atau dengan kata lain dalam satu tahun (selama 2013) 2 sampai 3 tindak kejahatan yang terjadi diantara 10.000 penduduk dapat ditangani oleh aparat kepolisian. Apabila diperhatikan selama 3 tahun terakhir tindak kejahatan yang tertangani sudah di atas 50 persen. Hal ini sebagai bukti penanganan kriminalitas oleh aparat keamanan sudah semakin baik.

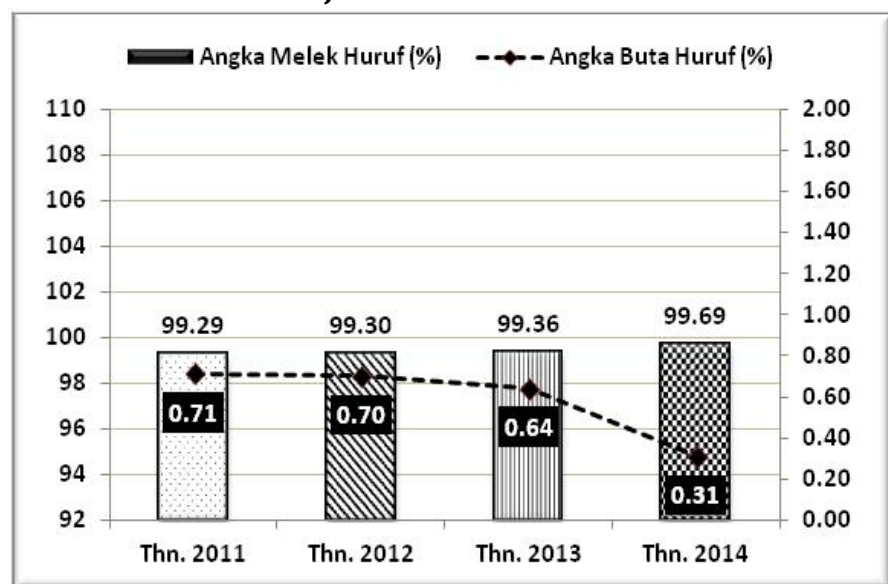
b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

1.1. Angka Melek Huruf

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk mewakili pengukuran tingkat pengetahuan (*knowledge*), namun proporsi angka melek huruf lebih tinggi dibanding rata-rata lama sekolah.

Gambar 4.3
Perkembangan Angka Melek Huruf dan Buta Huruf
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

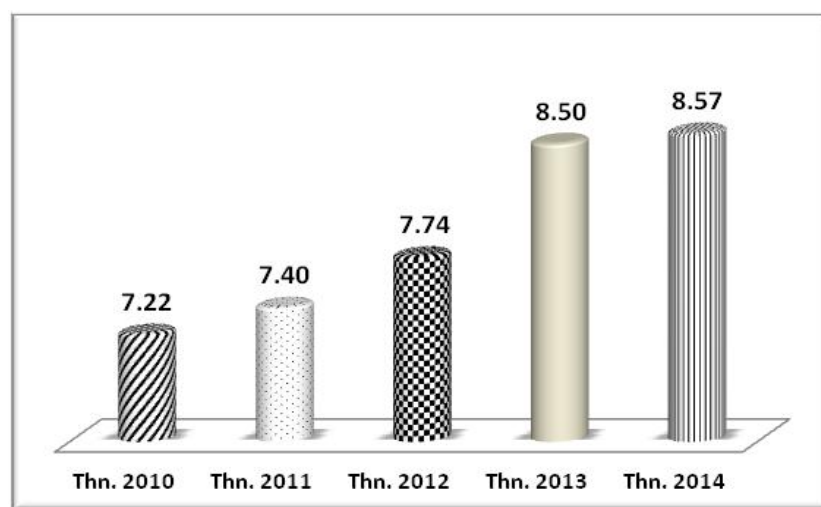
Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, melek huruf juga menjadi dasar bagi setiap manusia, agar

dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Ini yang menjadikan indikator melek huruf, sebagai indikator paling esensial di antara indikator pembangunan manusia yang lain. Demikian pentingnya indikator ini untuk mengukur dimensi pengetahuan, maka dalam formulasi *Human Development Index* (HDI) indikator pengetahuan yang terdiri dari rata-rata lama sekolah dan melek huruf, tingkat melek huruf memiliki bobot yang lebih tinggi (2/3) dibanding rata-rata lama sekolah.

1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan, tetapi jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia.

Gambar 4.4
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Di Jawa Timur 2010-2014



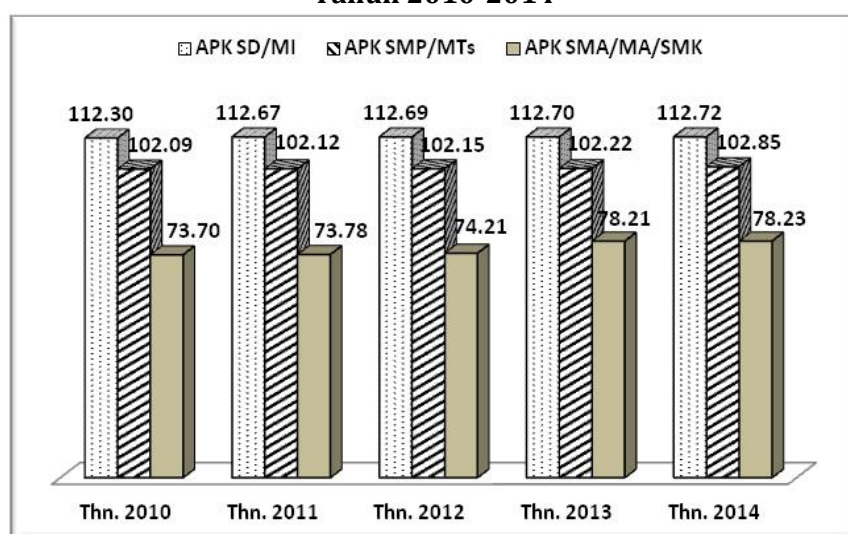
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka rata-rata lama sekolah di Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2014 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 7,22 tahun, meningkat menjadi 7,40 tahun pada tahun 2011, selanjutnya meningkat kembali secara berturut-turut pada periode 2012-2014 yakni masing-masing sebesar 7,74 (2012); 8,50 (2013); dan 8,57 (2014). Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Jawa Timur.

1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan adalah APK. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Kondisi ini dapat tercermin dari APK untuk setiap jenjang pendidikan.

Gambar 4.5
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MS/SMK
Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada suatu tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 tahun untuk SD sederajat, 13-15 tahun untuk SLTP sederajat dan 16-18 tahun untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang penting sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir mulai tahun 2010 hingga 2014, APK SD dan SLTP selalu diatas seratus persen, sedangkan APK SLTA berkisar pada angka 70 persen. Besaran APK SD di Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 112,30, kemudian pada tahun 2014 menjadi 112,72. Sementara itu, jumlah APK SLTP terus menunjukkan peningkatan. APK yang pada tahun 2010 berkisar pada angka 102,09 meningkat menjadi 102,85 pada tahun 2014, sedangkan untuk APK SLTA pada tahun 2010 sebesar 73,70 menjadi 78,23 pada tahun 2014. Kondisi ini memberikan gambaran semakin tinggi jenjang pendidikan daya serap anak sekolahnya semakin menurun.

1.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah formal di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Jika dilihat perkembangan pertahun penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah dalam empat tahun terakhir (tahun 2010 -2013) terus mengalami penurunan, yaitu sebesar 10,91 persen pada tahun 2010 hingga tinggal 8,49 persen pada tahun 2013. Persentase pendidikan penduduk usia 15 tahun ketas jika dibandingkan tahun 2012 yang mengalami peningkatan cukup tinggi adalah pada tingkat SLTA sederajat yaitu sekitar 1 persen. Kondisi ini kalau kita lihat dilapangan karena semakin banyaknya pendidikan kejuruan setingkat SLTA yang diminati penduduk, dengan harapan lulus sekolah mereka bisa langsung masuk dalam bursa tenaga kerja.

Tabel 4.8
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas di Jawa Timur Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun			
	2010*	2011*	2012*	2013**
Laki-laki				
Tidak/belumsekolah	6,11	5,59	4,91	4,74
TidaktamatSD	13,49	14,80	14,66	14,60
SD	31,81	30,50	29,81	29,60
SLTP	20,86	20,95	20,67	20,58
SLTA	22,01	22,40	23,51	24,88
PT	5,72	5,76	6,43	5,60
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100
N(000jiwa)	13.956.397	14.064.035	14.167.701	14.267.272
Perempuan				
Tidak/belumsekolah	15,44	13,78	13,00	12,07
TidaktamatSD	14,39	16,12	15,37	16,05
SD	30,15	28,59	28,75	28,86
SLTP	18,45	19,32	19,62	18,96
SLTA	16,54	16,86	17,76	18,48
PT	5,02	5,34	5,50	5,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100
N(000jiwa)	14.686.438	14.788.321	14.887.310	14.983.298
Laki-laki+ Perempuan				
Tidak/belumsekolah	10,91	9,80	9,06	8,49
TidaktamatSD	13,95	15,48	15,03	15,34
SD	30,96	29,51	29,27	29,22
SLTP	19,62	20,11	20,13	19,75
SLTA	19,20	19,55	20,56	21,60
PT	5,36	5,55	5,95	5,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100
N(000jiwa)	28.642.835	28.852.356	29.055.011	29.250.570

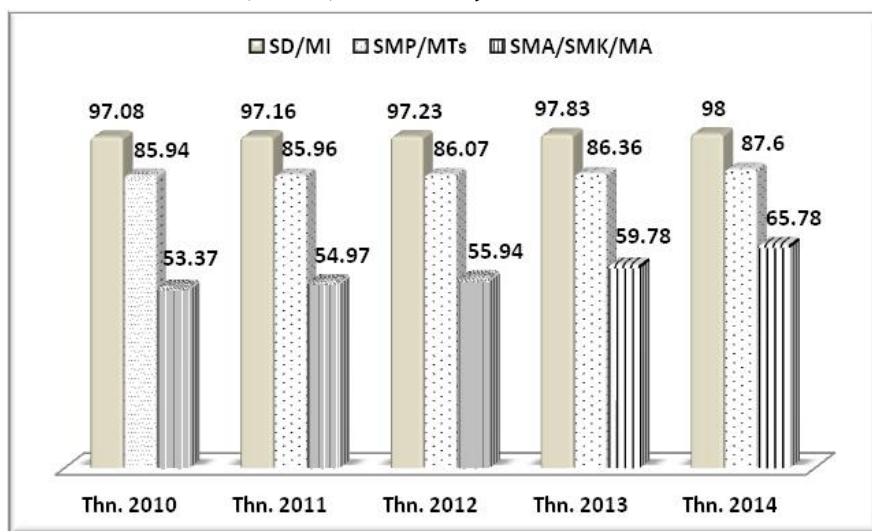
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : * Penduduk Hasil Backcasting; ** Proyeksi Penduduk

1.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan akses pendidikan.

Gambar 4.6
APM SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2010-2014



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Secara umum dalam lima tahun terakhir 2010-2014, terjadi peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berkisar pada angka 97 sampai 98 persen. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2010-2014 terus mengalami peningkatan mulai 85,94 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 87,6 persen di tahun 2014. Demikian halnya untuk jenjang pendidikan SLTA, capaian APM Jawa Timur mulai tahun 2010 terus meningkat mulai dari 53,37 persen hingga pada tahun 2014 sebesar 60,78 persen.

2. Kesehatan

2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan cermin ukuran dari angka kematian bayi yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun dengan jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 4.9
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Di Jawa Timur Tahun 2010-2014

No.	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	29.29	29.24	25.95	28.31	27.23
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	970.71	970.76	974.05	971.69	972.77

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

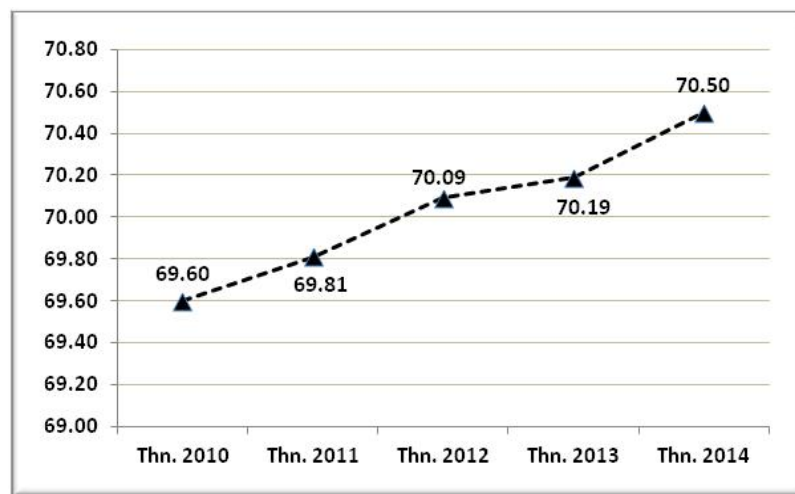
Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian per 1000 kelahiran hidup sekitar 972,77 pada tahun 2014. Data tersebut memberikan makna bahwa dari 1000 kelahiran hidup terdapat 972,77 bayi yang mencapai usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi pada tahun 2014 diproyeksikan menurun menjadi 27.23 per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

2.2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan

melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Gambar 4.7
Angka Harapan Hidup Penduduk Jawa Timur
Tahun 2010-2014



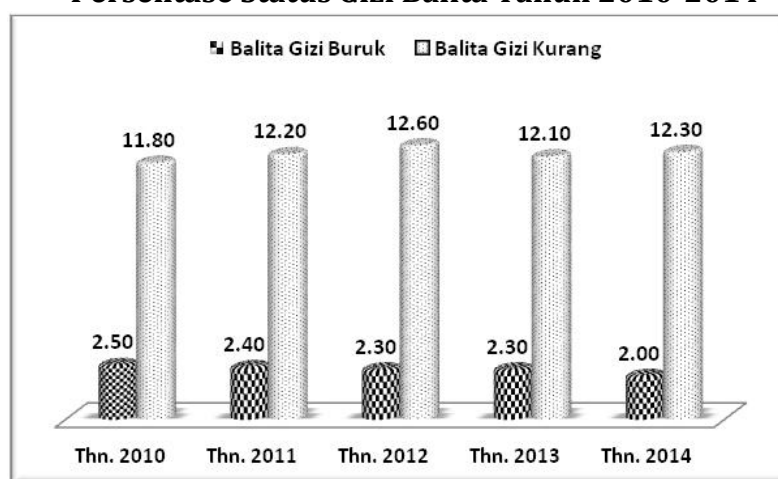
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*. Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 69,6 (2010) menjadi 70,50 (2014).

2.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Dari survei gizi balita yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2010 terdapat 2,50 persen balita berstatus gizi buruk dan tahun 2014 dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tinggal 2.00 persen. Hal ini dimungkinkan karena adanya pencaanangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2011-2015 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan yang terfokus pada penurunan kemiskinan dan kelaparan.

Gambar 4.8
Persentase Status Gizi Balita Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

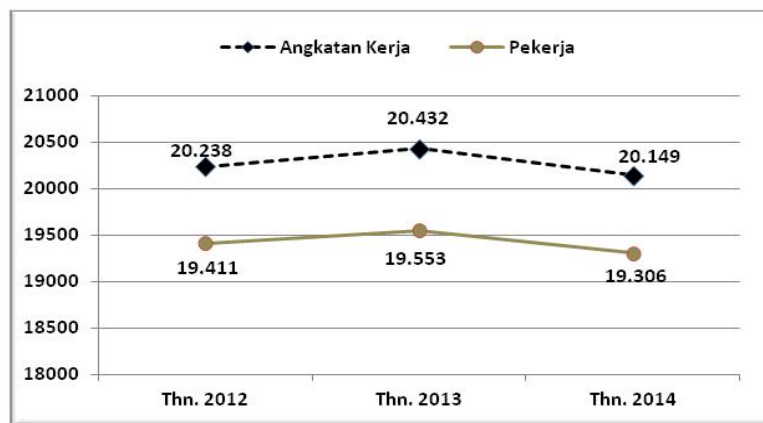
3. Ketenagakerjaan

3.1. Rasio Penduduk Yang Berkerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand

for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebesar 95,82 persen yang berarti bahwa dari 100 orang jumlah angkatan kerja, terdapat 96 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Gambar 4.9
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan dan Pekerja
di Jawa Timur Tahun 2012-2014 (Jutaan Orang)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

c. Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga

1. Kebudayaan

1.1. Jumlah Grup Kesenian

Pengembangan kebudayaan di Jawa Timur pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan berakhlak mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur jumlah kelompok kesenian pada tahun 2010 sebanyak 2.808 kelompok dan meningkat menjadi 6.037 kelompok pada tahun 2014. Dari 4 kelompok kesenian tertinggi pada tahun 2014 adalah kesenian musik sebanyak 4.234 kelompok, diikuti kesenian teater sebanyak 924

kelompok, selanjutnya kesenian tari sebanyak 712 kelompok, dan kesenian lukis sebanyak 167 kelompok. Secara grafis perkembangan jumlah Kelompok Kesenian di Jatim tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.10
Jumlah Kelompok Kesenian di Jawa Timur
Tahun 2010-2014

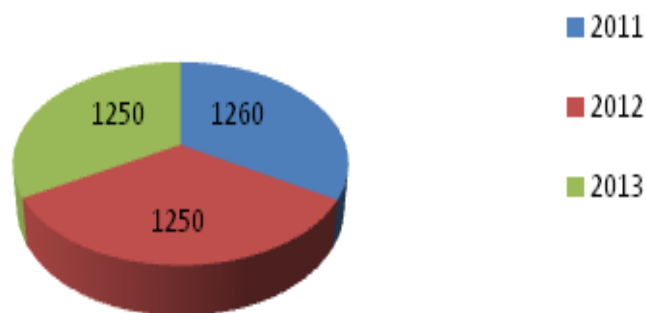
Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Seni Lukis	39	39	39	39	167
Tari	313	313	313	306	712
Teater	911	911	911	911	924
Musik	1.545	1.545	1.545	1.545	4.234
Jumlah	2.808	2.808	2.808	2.801	6.037

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

1.2. Jumlah Gedung

Gedung budaya dan seni adalah sebuah tempat atau bangunan yang mempunyai fungsi sebagai arena atau ajang pertunjukan kebolehan, bakat dalam bidang seni dan budaya bangsa. Contoh budaya bangsa seperti tari remo, lukisan atau seni – seni yang lainnya.

Gambar 4.10
Jumlah Kelompok Kesenian di Jawa Timur
Tahun 2011-2013



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dari dinas terkait jumlah gedung/sarana penyelenggara kesenian berjumlah 1260 gedung pada tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 sejumlah 1250 gedung/sarana dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2013.

II. ASPEK PELAYANAN UMUM

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

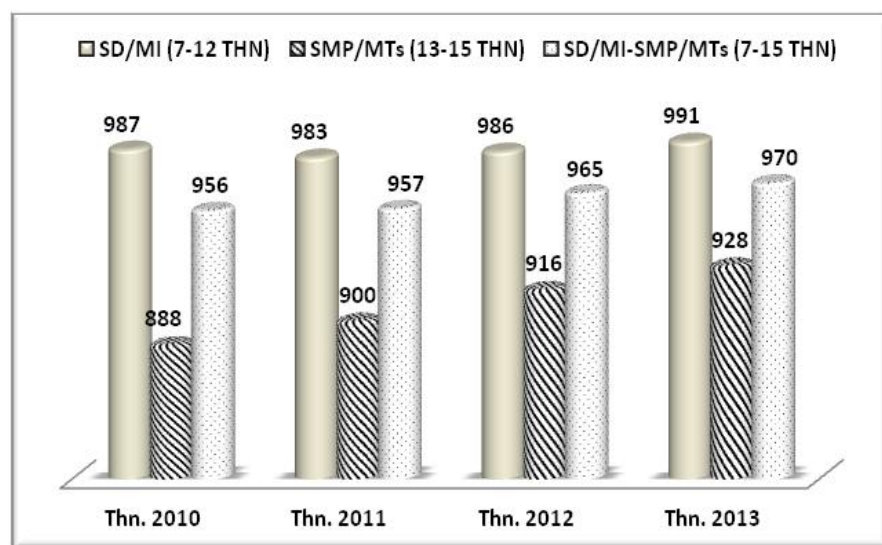
1. Pendidikan

1.1. Pendidikan Dasar

1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di bidang pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Gambar 4.11
APS SD/MI, SMP/MTs, dan SD/MI-SMP/MTs Provinsi Jawa Timur 2010-2013



Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka partisipasi sekolah di Jawa Timur untuk anak usia 7-12 tahun dalam empat tahun terakhir (tahun 2010-2013) menunjukkan nilai yang cenderung stabil pada kisaran angka 980 namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 991 per 1.000 penduduk usia 7-12 tahun. Angka ini berarti bahwa di Jawa Timur dalam tiap 1.000 anak usia 7-12 tahun sekitar 10 anak diantaranya sedang tidak bersekolah.

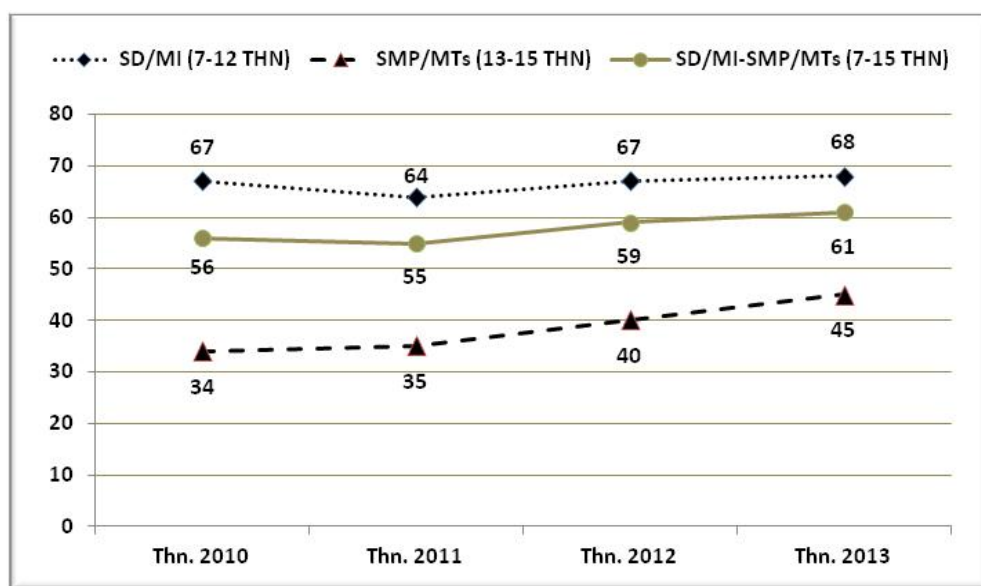
Sementara itu angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun di Jawa Timur dalam empat tahun terakhir (tahun 2010-2013) menunjukkan kesenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2010 APS usia 13-15 tahun sebesar 888 dan terus meningkat hingga pada tahun 2013 menjadi 928 per 1.000 penduduk usia 13-15 tahun. Hal ini tentunya menjadi prestasi tersendiri mengingat pada saat ini sedang gencarnya program wajib belajar 9 tahun. Namun demikian masih perlu diperhatikan mengingat masih ada sekitar 70 anak per 1.000 anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah.

Gabungan APS usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun merupakan gambaran APS Pendidikan Dasar. Dalam empat tahun terakhir APS pendidikan dasar di Jawa Timur menunjukkan nilai yang terus meningkat, walaupun peningkatannya tidak tinggi. APS Pendidikan Dasar pada tahun 2010 sebesar 956 per 1.000 anak usia 7-15 tahun sedangkan pada tahun 2013 sebesar 970 per 1.000 anak usia 7-15 tahun. Dengan semakin meningkatnya APS pendidikan dasar maka program wajar 9 tahun akan segera tercapai.

1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar pemerintah senantiasa menyediakan sarana fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangkan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk.

Gambar 4.12
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Timur 2010-2013



Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Rasio ketersediaan sekolah tingkat pendidikan dasar adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar (SD – SLTP). Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah di Jawa Timur mulai tahun 2010 sampai tahun 2013 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar juga meningkat. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tentunya harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah.

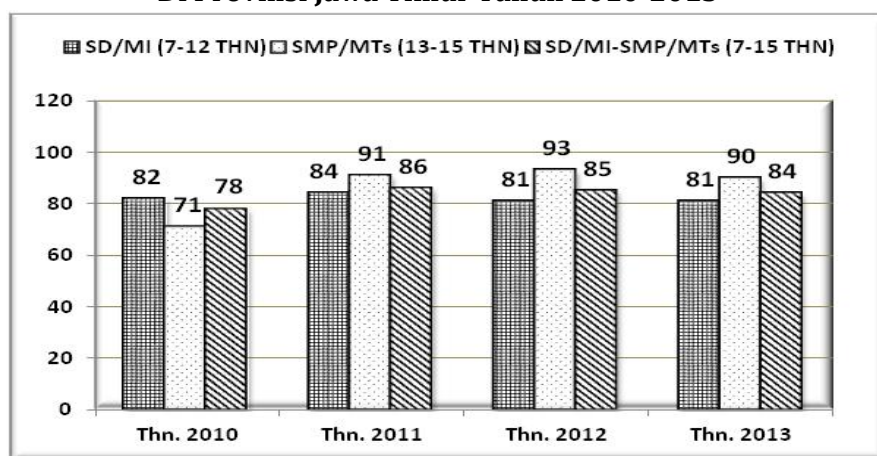
1.1.3. Rasio Guru/Murid

Penunjang keberhasilan program pendidikan akan sangat tergantung ketersediaan tenaga pengajar/guru. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran angka rasio

guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru murid untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2013 sebesar 81 per seribu ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 12 murid, sedangkan pada sekolah setingkat SLTP setiap guru mengajar anak sekitar 11. Secara umum pada jenjang pendidikan sekolah dasar setiap guru mengajar sekitar 12 murid. Kalau mengacu pada aturan standart ideal rasio guru murid, kondisi sekolah pendidikan dasar di Jawa Timur kebanyakan guru, karena idealnya rasio guru murid sekitar 1 banding 20.

Gambar 4.13
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

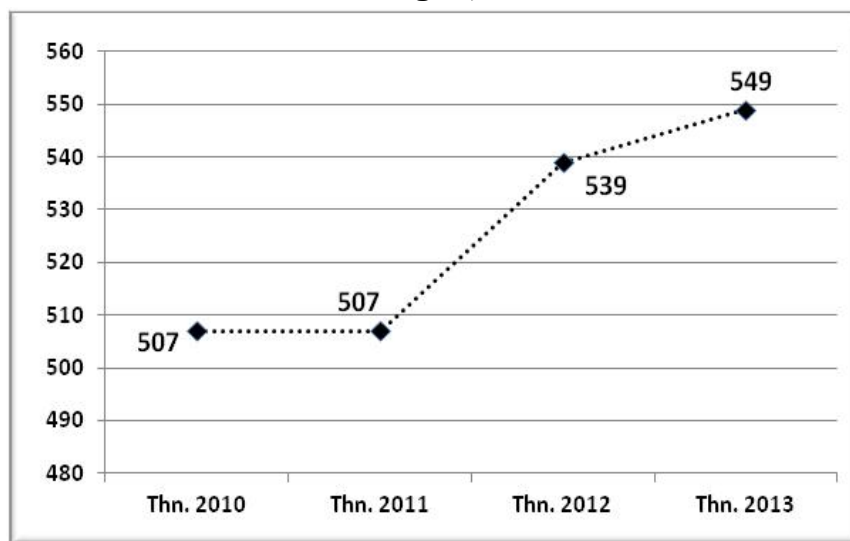
1.2. Pendidikan Menengah

1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS Pendidikan Menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. APS di tingkat pendidikan menengah merupakan

ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Gambar 4.14
APS Pendidikan Menengah Jawa Timur 2010-2013



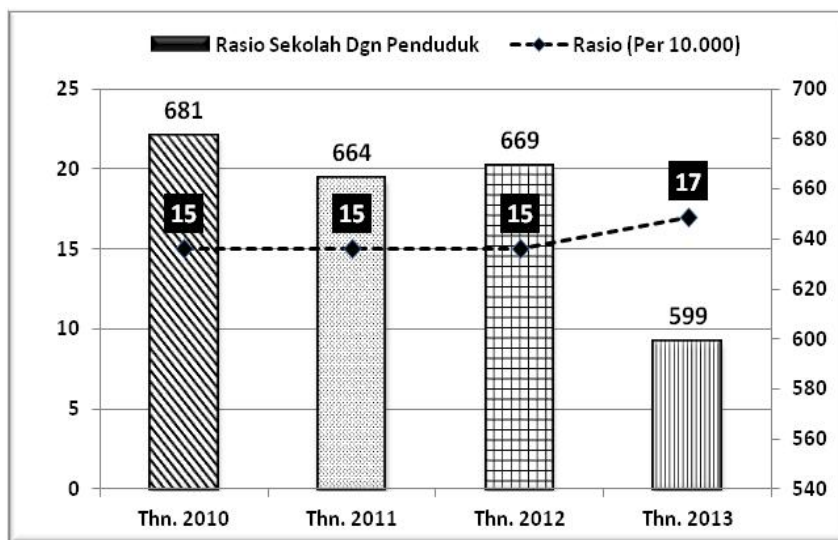
Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah di Jawa Timur untuk anak usia 16-19 tahun kurun waktu 2010-2013 menunjukkan nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2010 APS usia 16-19 tahun sebesar 507 dan terus meningkat hingga pada tahun 2012 menjadi 539 per 1.000 penduduk usia 16-19 tahun dan meningkat kembali menjadi 549 pada tahun 2013.

1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Dalam menunjang program wajib belajar 12 tahun pemerintah senantiasa meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, salah satunya adalah pembangunan sekolah baru yang akan menampung anak usia 16-19 tahun.

Gambar 4.15
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2013



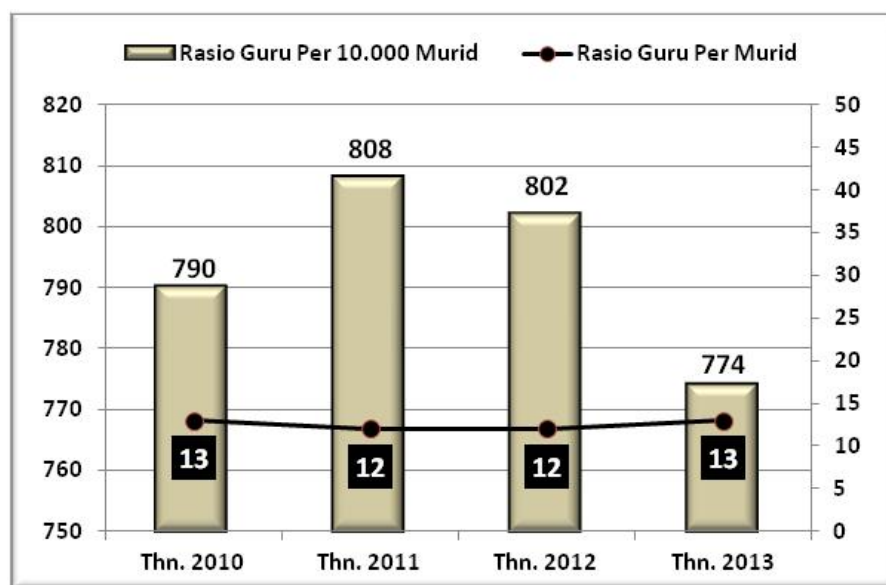
Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Keberadaan jumlah sekolah SLTA sederajat di Jawa Timur mulai tahun 2010 sampai tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan, penambahan jumlah sekolah setingkat SLTA ini ditujukan untuk menampung penduduk usia 16-19 tahun yang ingin melanjutkan sekolah pada jenjang SLTA. Kalau kita lihat ketersediaan sekolah pendidikan menengah per 10.000 penduduk usia 16-19 tahun pada tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan, dari 15 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2010 – 2012 menjadi 17 di tahun 2013. Dengan kata lain setiap sekolah pada tahun 2013 menampung sekitar 600 penduduk. Kondisi ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah.

1.2.3. Rasio Guru Terhadap Murid

Seperti halnya pada pendidikan dasar jumlah ketersediaan guru pada jenjang pendidikan menengah juga akan sangat mempengaruhi kualitas dan mutu pendidikan.

Gambar 4.16
Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2013



Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran angka rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah (16-19 tahun). Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dalam empat tahun terakhir (tahun 2010-2013) menunjukkan angka yang berfluktuasi, pada kisaran angka 800. Kalau kita perhatikan jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan menengah pada lima tahun terakhir sebenarnya keduanya sama-sama menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan jumlah murid

masih kurang diimbangi dengan penambahan guru. Pada tahun 2013 perbandingan guru dengan murid sebesar 774, atau dengan kata lain seorang guru menangani sekitar 13 murid. Kalau dibandingkan kondisi ideal rasio guru murid sebesar 20 maka angka 13 ini masih dibawahnya, kondisi seperti ini tentunya jika benar-benar dimanfaatkan akan lebih baik karena beban seorang guru hanya sekitar 13 murid. Permasalahan yang kita jumpai di lapangan adalah tidak meratanya jumlah guru untuk masing masing sekolah, pada sekolah-sekolah tertentu yang lebih maju ketersediaan guru lebih cukup dibanding pada sekolah-sekolah yang biasa.

1.3. Fasilitas Pendidikan

1.3.1. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh *stakeholder* yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik. Proses belajar mengajar pada sekolah dilakukan dalam ruang kelas. Untuk menunjang proses belajar mengajar diperlukan fasilitas ruang kelas yang memadai dan kondisinya layak.

Jumlah ruang kelas untuk sekolah setingkat SD sederajat di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) berkisar antara 160 ribu hingga 222 ribu kelas. Dari jumlah ruang kelas keseluruhan rata-rata sekitar 94 persen kondisinya layak (baik dan rusak ringan) sementara sekitar 6 persen kondisinya rusak berat.

Tabel 4.11
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan Pada
Sekolah SD Sederajat Di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Ruang Kelas Kondisi Baik	94,881	107,113	72,146	167,601	209,477
2	Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	39,401	36,537	30,310	6,791	6,211
3	Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	29,439	26,677	23,354	8,086	6,410
4	Jumlah Ruang Kelas	163,721	170,327	125,810	182,478	222,098
5	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik dan Rusak Ringan	57.95	62.88	57.34	91.85	94.32

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.3.2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Ruang Kelas Baik

Kondisi ruang kelas sekolah setingkat SLTP dan SLTA sederajat di Jawa Timur, kondisinya lebih baik jika dibanding pada sekolah setingkat SD sederajat. Untuk sekolah setingkat SLTP sederajat ruang kelas yang kondisinya layak (baik dan rusak ringan) dilihat dalam lima tahun terakhir perkembangannya cukup menggembirakan yaitu pada tahun 2010 sebanyak 46.803 dan meningkat menjadi 76.041 pada tahun 2014, sehingga rata-rata pertumbuhan persentase ruang kelas berkondisi layak sekitar 12,5% per tahun. Sedangkan untuk sekolah tingkat SLTA sederajat, dalam lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) rata-rata pertumbuhan persentase ruang kelas berkondisi layak sekitar 28% per tahun, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan Pada
Sekolah SLTP Sederajat dan SLTA Sederajat Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
Sekolah Pendidikan SLTP Sederajat						
1	Ruang Kelas Kondisi Baik	40,945	41,350	47,039	70,468	71,015
2	Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	5,858	7,223	7,184	5,080	5,026
3	Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	2,134	2,127	2,738	2,500	2,287
4	Jumlah Ruang Kelas	48,937	50,700	56,961	78,048	78,328
5	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik dan Rusak Ringan	83.66	81.55	82.58	90.29	90.66
Sekolah Pendidikan SLTA Sederajat						
1	Ruang Kelas Kondisi Baik	27,468	27,538	30,982	33,881	35,769
2	Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	2,449	2,611	2,957	2,578	2,523
3	Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	712	722	862	915	878
4	Jumlah Ruang Kelas	30,629	30,871	34,801	37,374	39,170
5	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik dan Rusak Ringan	89.67	89.20	89.02	90.65	91.32

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun) bahkan batita (bawah tiga tahun). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jawa Timur terus digalakkan di berbagai daerah kabupaten maupun kota. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, selain juga untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak usia dini. Selama dua tahun terakhir jumlah lembaga PAUD terus bertambah 23.940 lembaga tahun 2013 dan tahun 2014 menjadi sebesar 26.894. Begitu pula jumlah siswa PAUD dari 1.410.568 pada tahun 2013

meningkat menjadi sebanyak 1.410.571 siswa pada tahun 2014. Tenaga Pendidik PAUD pada tahun 2013 sebanyak 98.548 orang dan mencapai 99.758 orang pada tahun 2014.

Tabel 4.13
Jumlah Lembaga, Murid, Tenaga Pendidikan PAUD
di Jawa Timur Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Lembaga PAUD	17,186	21,741	22,347	23,940	26,984
2	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD	54,833	80,042	86,432	98,548	99,758
3	Jumlah Murid PAUD	767,224	995,422	973,497	1,410,568	1,410,571
4	Jumlah Anak usia 4-6 Tahun	1,807,070	1,793,930	1,973,323	2,423,240	2,454,652
5	Angka Partisipasi PAUD (%)	57.58	61.80	66.52	71.66	78.54
6	Rasio Tenaga Pendidik per 100 Murid	7.96	8.07	9.13	16.04	16.07

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

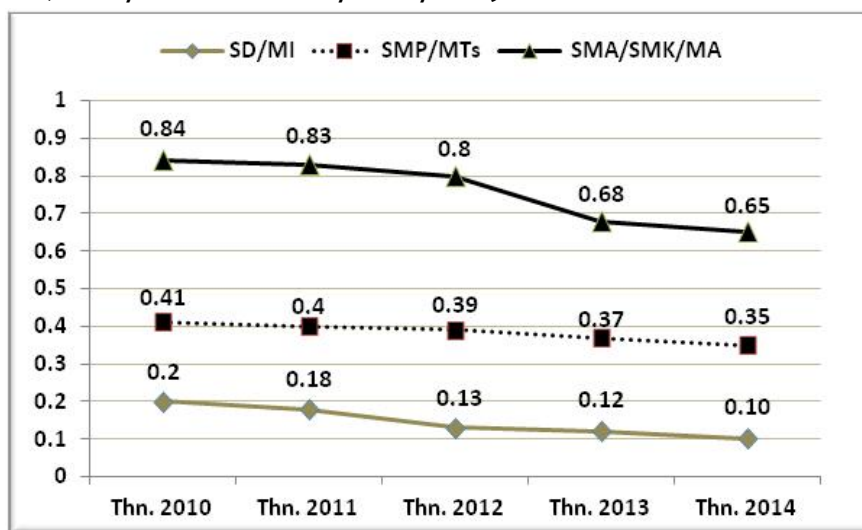
Jumlah penduduk usia Taman Kanak-Kanak yaitu usia 4-6 tahun di Provinsi Jawa Timur menunjukkan 1.973.323 orang pada tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi 2.454.652 orang. Begitu pula angka partisipasi PAUD meningkat dari 57,58 persen di tahun 2010 menjadi 71,66 persen pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 sebanyak 78,54 persen. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) rasio tenaga pendidik juga terus mengalami peningkatan dari 7,96 pada tahun 2013 menjadi 16,67 pada tahun 2014.

1.5. Angka Putus Sekolah

Berbagai program pemerintah dalam bidang pendidikan telah diberikan kepada masyarakat baik yang sifatnya umum seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan yang sifatnya khusus seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) disemua jenjang pendidikan mulai SD hingga SLTA dan juga ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan sangat miskin. Program-program tersebut salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi angka putus sekolah bagi mereka yang kurang mampu. Namun demikian kenyataannya masih juga terdapat siswa yang putus sekolah.

Pada sekolah SD/MI angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2010 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,20 persen dan menurun hingga pada tahun 2014 sebesar 0,10 persen. Pada tahun 2014 dalam tiap 1000 anak usia 7-12 tahun terdapat 1 sampai 2 anak yang putus sekolah.

Gambar 4.17
Angka Putus Sekolah Pada Jenjang pendidikan
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Jawa Timur Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

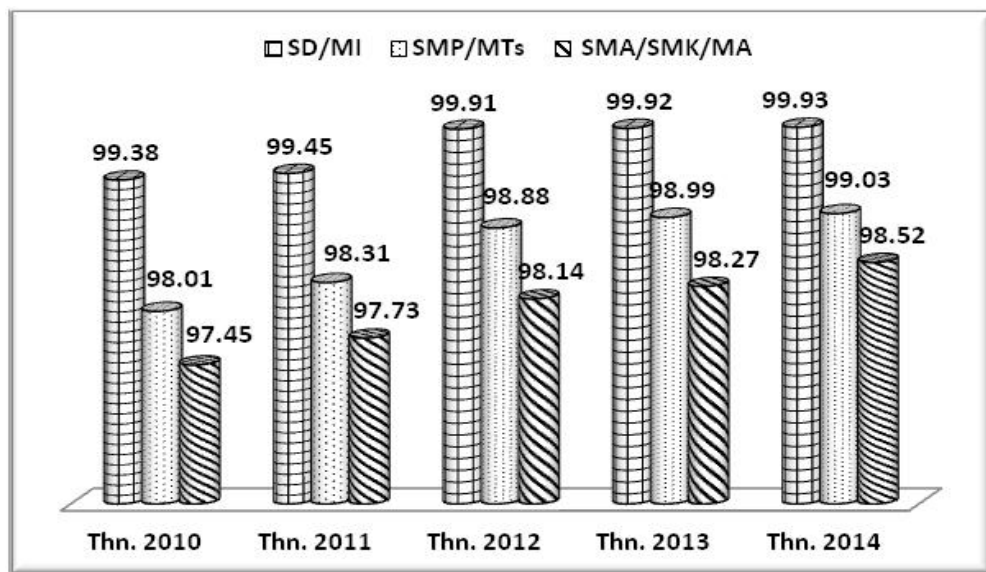
Untuk sekolah SMP/MTs angka putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) pada tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2010 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,41 persen dan menurun hingga pada tahun 2014 sebesar 0,35 persen. Pada tahun 2014 dalam tiap 1000 anak usia 13-15 tahun terdapat 3 sampai 4 anak yang putus sekolah.

Sedangkan pada sekolah setingkat SLTA angka putus sekolah cenderung lebih tinggi jika dibanding pada sekolah setingkat SD maupun SLTP. Angka Putus Sekolah penduduk usia 16-18 tahun dalam lima tahun terakhir pada tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun yaitu mulai 0,84 persen menjadi 0,65 persen. Pada tahun 2014 dalam tiap 1000 anak usia 16-18 tahun terdapat 6 sampai 7 anak yang putus sekolah.

1.6. Angka Kelulusan

Pada setiap jenjang pendidikan sekolah formal sebagai syarat kelulusan murid bagi mereka yang telah menduduki kelas tertinggi (kelas 6 untuk SD sederajat dan kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat) diadakan ujian akhir atau Ujian Nasional (UNAS).

Gambar 4.18
Angka Kelulusan Pada Jenjang pendidikan
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

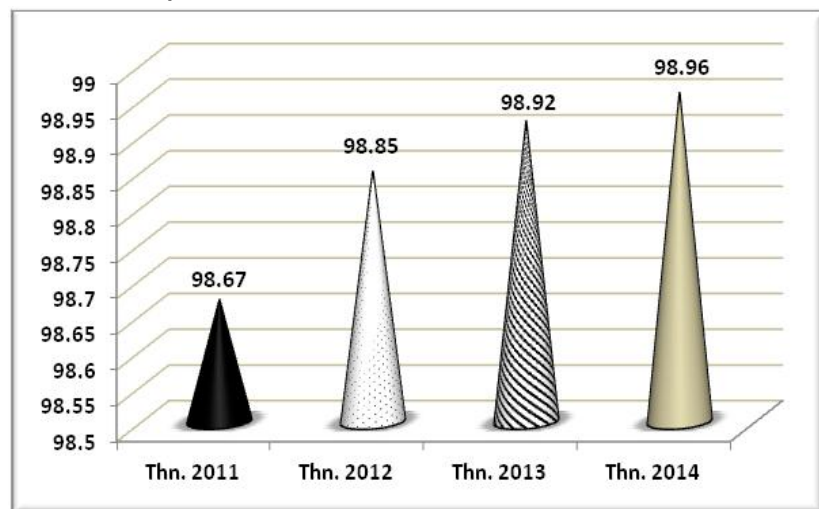
Siswa yang hasil nilai ujian akhirnya memenuhi standart kelulusan akan dinyatakan lulus. Angka kelulusan akan mencerminkan tingkat kualitas dari pendidikan tersebut, jika suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Pada sekolah SD/MI angka kelulusan dalam lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) angkanya berfluktuasi, namun dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Berbeda halnya dengan angka kelulusan sekolah SMP/MTs, dalam lima tahun terus meningkat, pada tahun 2010 sebesar 98,01 persen menjadi 99,03 persen pada tahun 2014. Sedangkan angka kelulusan pada sekolah setingkat SMA/SMK/MA angka kelulusan dalam lima tahun terakhir terus meningkat, mulai 97,45 persen pada tahun 2010 terus meningkat menjadi 98,52 persen pada tahun 2014.

1.6.1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Tingginya angka kelulusan suatu jenjang pendidikan hendaknya diimbangi dengan penyediaan sarana pendidikan pada jenjang di atasnya. Penyediaan sarana ini sangat dimungkinkan untuk menampung mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan tersediannya sarana pendidikan pada jenjang di atasnya akan meningkatkan angka melanjutkan sekolah pada suatu jenjang pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari jenjang yang rendah ke jenjang di atasnya pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Dengan tingginya pendidikan masyarakat akan membawa kemajuan pada wilayah tersebut.

Gambar 4.19
Angka Melanjutkan Pada Jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs di Jawa Timur Tahun 2011-2014



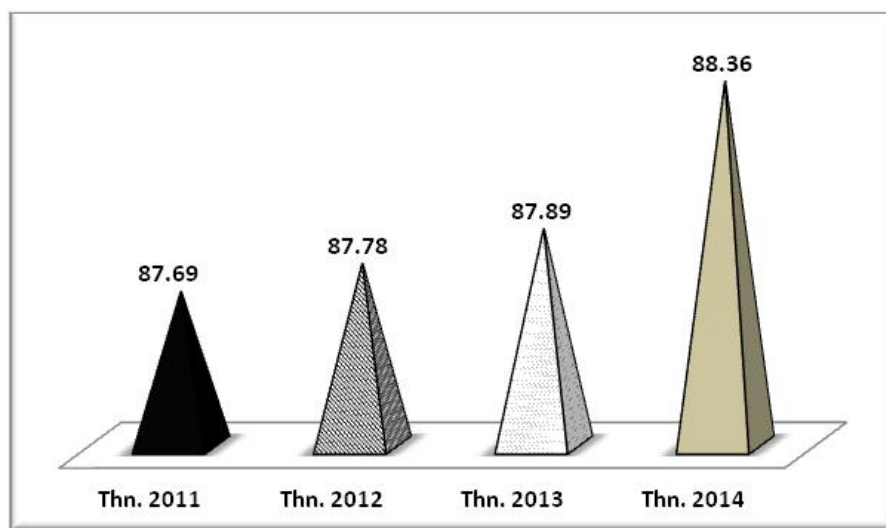
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs di Jawa Timur pada tahun 2014 terjadi peningkatan, walaupun peningkatannya kecil yaitu pada tahun 2011 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 98,67 persen menjadi 98,96 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap 100 anak lulusan SD/MI terdapat sekitar 1 anak yang tidak melanjutkan sekolah ke SMP/MTs.

1.6.2. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA adalah persentase dari jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/ MTs tahun ajaran sebelumnya. Perkembangan angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/SMK/MA jauh lebih rendah dibanding pada SD/MI ke SMP/MTs yaitu pada tahun 2010 sebesar 87,69 persen menjadi 88,36 persen pada tahun 2014. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa setiap 100 anak lulusan SMP/MTs terdapat sekitar 12 anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA.

Gambar 4.20
Angka Melanjutkan Pada Jenjang pendidikan
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Jawa Timur Tahun 2011-2014

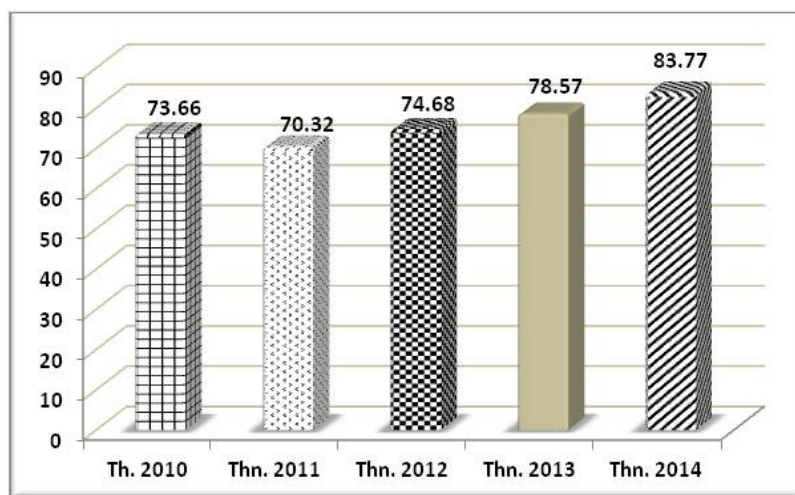


Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.6.3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru akan sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Gambar 4.21
Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1-Div
Pada Semua Jenjang Pendidikan
(Sd/Mi, Smp/Mts, Dan Sma/Smk/Ma)



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada semua jenjang Pendidikan dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, dari 73,66 persen pada tahun 2010 menjadi 83,02 persen pada tahun 2014. Secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan tuntutan saat ini dan juga dengan adanya sistem sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

2. Kesehatan

2.1. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ditempuh dengan cara mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakatnya. Pendekatan akses ini diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Garda terdepan dalam kemajuan tingkat kesehatan ibu dan anak tidak lepas dari keberadaan posyandu.

Tabel 4.14
Jumlah Posyandu dan Balita di Jawa Timur
Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Posyandu	45.603	45.637	45.87	46.059
Jumlah Balita *)	2.928.002	2.949.472	2.970.236	2.990.267
Rasio Posyandu **)	15,57	15,47	15,44	15,40

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi Jawa Timur

*Keterangan: *) Jumlah Penduduk usia 0-4 Tahun Hasil Proyeksi SP2010, BPS*

***) Angka diperbaiki*

Dari tahun 2010 hingga tahun 2013, jumlah posyandu mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,33 persen, peningkatan persentase tertinggi terjadi dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 0,51 persen. Rasio posyandu per satuan balita selama 3 tahun terakhir cenderung turun. Pada tahun 2011, rasio posyandu terhadap balita sebesar 15,47 dan mengalami penurunan menjadi 15,44 di tahun 2012. Pada tahun 2013, rasio posyandu terhadap balita mengalami penurunan 0,04 poin dari tahun sebelumnya. Angka 15,40 menunjukkan setiap 1000 balita dilayani oleh 15,40 posyandu.

2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas kesehatan. Dari tahun 2010 ke tahun 2011, rasio puskesmas, poliklinik dan pustu mengalami perubahan sebesar 0,003 poin, sementara dari tahun 2011-2013 tidak mengalami perubahan berarti. Pada tahun 2013 rasio puskesmas, poliklinik dan pustu sebesar 0,109. Angka 0,109 menunjukkan bahwa setiap 0,109 unit (puskesmas, poliklinik dan pustu) melayani setiap 1.000 penduduk.

Tabel 4.15
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Jawa Timur
Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	4.036	4.15	4.173	4.176
Jumlah Penduduk *)	37.565.706	37.840.657	38.106.590	38.363.195
Rasio **)	0,107	0,110	0,110	0,109

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : *) Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi SP2010, BPS

**) Angka diperbaiki

2.3. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit di Jawa Timur terbagi dalam 4 kategori pengelolaan yaitu Pemerintah (Kabupaten/Kota/Provinsi), TNI/Polri, BUMN dan Swasta. Jumlah rumah sakit pada tahun 2013 sebesar 355 rumah sakit atau bertambah sebesar 11 rumah sakit dalam kurun waktu setahun. Peningkatan tersebut terjadi pada rumah sakit swasta, BUMN, pemerintah berturut-turut sebanyak 8 rumah sakit, 2 rumah sakit dan 1 rumah sakit. Peningkatan jumlah rumah sakit tersebut menggambarkan adanya upaya pemenuhan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 4.16
Jumlah Rumah Sakit di Jawa Timur Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Rumah Sakit Pemerintah	64	65	66
Rumah Sakit TNI/Polri	27	27	27
Rumah Sakit BUMN	12	13	15
Rumah Sakit Swasta	226	239	247
Jumlah Rumah Sakit	329	344	355
Jumlah Penduduk *)	37.840.657	38.106.590	38.363.195
Rasio **)	0,0870	0,0903	0,0925

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : *) Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi SP2010, BPS

**) Angka diperbaiki

Rasio rumah sakit terhadap penduduk pada tahun 2013 sebesar 0,0925 atau mengalami peningkatan sebesar 0,0022 poin dari tahun 2012. Angka rasio tersebut menunjukkan setiap 10.000 penduduk akan dilayani 0,092 unit rumah sakit.

2.4. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC (*Mycobacterium tuberculosis*). TBC lebih sering menyerang paru-paru, namun juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti selaput otak, kulit, tulang, kelenjar getah bening, dan bagian tubuh lainnya. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang teratur.

Tabel 4.17
Jumlah Penderita TBC Baru Menurut Kriteria di Jawa Timur
Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	19.599	21.475	23.633	22.948
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	19.13	20.452	24.169	23.824
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	102,45	105,00	97,78	96,32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Jumlah penderita baru TBC di Jawa Timur tahun 2013 mencapai 22.948 kasus atau turun sebesar 2,90 persen dari tahun 2012. Dalam kurun waktu 5 tahun ini hanya pada tahun 2013 jumlah penderita TBC baru mengalami penurunan dan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 peningkatan tertinggi untuk kasus ini terjadi di 11 kabupaten yang peningkatan penderita TBC baru di atas 100 kasus yaitu Jember, Malang, Pamekasan, Jombang, Bojonegoro, Mojokerto, Kediri, Pasuruan, Gresik, Malang dan Sampang. Tahun 2013 peningkatan yang terjadi di atas 100 kasus terjadi di 3 kabupaten/kota, yaitu Sidoarjo, Lamongan dan Kota Pasuruan.

2.5. Cakupan Pemenemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam berdarah atau lebih tepatnya disebut demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang sangat berbahaya bila tidak segera mendapat penanganan dan pengobatan karena bisa mengakibatkan kematian. Saat ini penyakit demam berdarah bisa menyerang semua umur, baik anak-anak maupun dewasa. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang tergolong sebagai sejenis virus arbovirus yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* betina.

Tabel 4.18
Jumlah dan Penanganan DBD di Jawa Timur
Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	20.502	4.495	8.07	12.699
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	21.812	4.495	8.07	12.705
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	93,99	100,00	100,00	99,95

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Penderita DBD di Jawa Timur mencapai 12.699 kasus pada tahun 2013. Kasus pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012, ada 3 kabupaten yang memberikan kontribusi kenaikan kasus DBD selama tahun 2013 yaitu Kabupaten Surabaya, Jember dan Blitar. Sementara itu cakupan dan penanganan penderita DBD pada tahun 2013 mencapai 99,95 persen. Angka ini menunjukkan setiap 100 kasus DBD ada 99,95 jiwa yang mendapat penanganan. Angka cakupan sebesar 100 terjadi di semua Kabupaten/Kota se Jawa Timur kecuali Kabupaten Nganjuk yang angka capaiannya pada kisaran 97.

2.6. Cakupan Puskesmas

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota/kabupaten yang melaksanakan penyuluhan, pencegahan

& penanganan kasus penyakit diwilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Tabel 4.18
Jumlah dan Cakupan Puskesmas di Jawa Timur
Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Jumlah Puskesmas	956	960	960
Jumlah Kecamatan	662	662	664
Cakupan Puskesmas (%)	144,41	145,02	144,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi Jawa Timur

Jumlah puskesmas di Jawa Timur pada tahun 2013 sebanyak 960 puskesmas yang tersebar di 664 kecamatan. Angka cakupan puskesmas sebesar 144,58 persen atau setiap 100 kecamatan yang ada akan dilayani oleh 145 puskesmas. Angka cakupan ini menurun 0,44 poin dibandingkan tahun 2012 dikarenakan adanya pemekaran 2 kecamatan di Jawa Timur. Keberadaan puskesmas yang menjangkau semua kecamatan akan mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakatnya. Kondisi ini akan memberikan dukungan terhadap pencapaian pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau semua pelosok di Jawa Timur.

2.7. Cakupan Puskesmas Pembantu

Upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Peningkatan jaringan pelayanan dasar dalam hal ini puskesmas diupayakan dengan memperluas jangkauan puskesmas dengan mendirikan puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu (pustu) adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

Tabel 4.20
Jumlah dan Cakupan Puskesmas Pembantu di Jawa Timur
Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Jumlah Puskesmas Pembantu	2.279	2.274	2.272
Jumlah Desa	8.502	8.503	8.505
Cakupan Pustu (%)	26,81	26,74	26,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi Jawa Timur

Jumlah pustu yang ada di Jawa Timur sebanyak 2.274 unit di tahun 2012 menjadi 2.272 unit di tahun 2013, di mana pengurangan pustu terjadi di Pacitan, Lamongan, dan Bangkalan, masing-masing berkurang 1 unit pustu serta penambahan unit pustu di Situbondo. Keberadaan pustu ini belum tersebar di semua desa yang ada di Jawa Timur. Hal ini dapat ditunjukkan dari angka cakupan pembantu puskesmas yang mencapai 26,74 persen di tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 26,71 persen.

3. Pekerjaan Umum

3.1. Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai mantap sempurna, mantap marginal dan tidak mantap, hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif.

Panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya. Kemantapan ini berupa kerataan permukaan perkerasan sehingga nyaman untuk berkendara namun tidak memperhitungkan kekuatan struktur jalannya. Kemantapan ini diperoleh dari pelaksanaan pemeliharaan rutin tambal sulam dan pemeliharaan berkala serta peningkatan jalan.

Tabel 4.21
Perkembangan Kondisi Jalan Tahun 2013 – 2014

KONDISI JALAN	Satuan	TAHUN	
		2013	2014
Baik	Km	717,553	893,422
Sedang	Km	839,068	678,520
Mantap	Km	1.556,621	1.571,942
	(%)	88,40	89,27
Rusak ringan	Km	181,791	178,470
Rusak berat	Km	22,500	10,500
Tidak Mantap	Km	204,291	188,970
	(%)	11,60	10,73

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

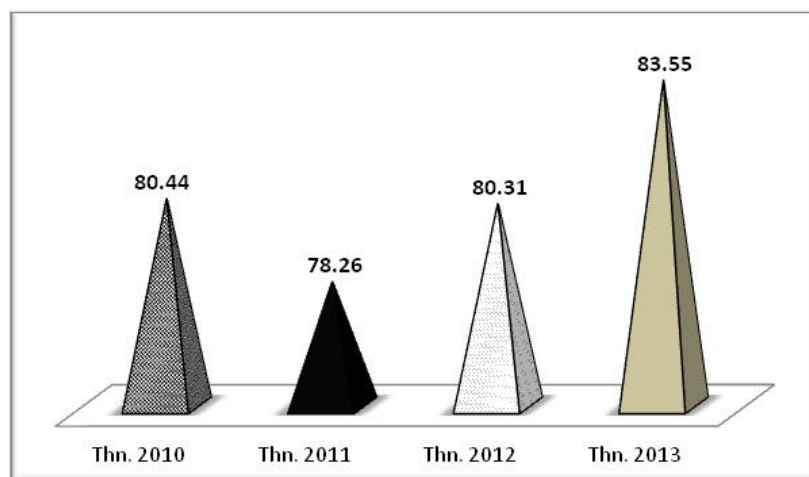
Pemeliharaan rutin dan berkala hanya untuk lapisan permukaan perkerasan saja sehingga tidak menambah nilai struktural jalan. Sehingga kemantapan jalan yang didapat dari pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala berupa kemantapan marjinal dan kemantapan struktural jalan didapat dari pelaksanaan peningkatan.

Perkembangan nilai kemantapan jalan di Jawa timur tahun 2014 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 88,40 persen menjadi 89,27 persen. Sedangkan untuk jalan yang tidak mantap mengalami penurunan dari 11,60 persen pada tahun 2013 menjadi 10,73 persen pada tahun 2014.

3.2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Salah satu cara dalam meningkatkan kesehatan adalah melakukan pola hidup bersih. Pola hidup bersih bertujuan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan limbah berbahaya lainnya.

Gambar 4.22
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
di Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dengan pola hidup bersih dapat meningkatkan kesehatan manusia. Oleh karena itu keberadaan sanitasi menjadi sangat penting di dalam setiap rumah tangga. Bahan buangan (limbah) rumah tangga yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tinja manusia atau binatang, dapat dicegah dengan menggunakan teknologi sederhana seperti membuat kakus dan tangki septik.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun rumah sehat dan menciptakan kondisi lingkungan perumahan yang sehat, dapat dilihat dari fasilitas tempat buang air besar. Menurut data Susenas 2013, rumah tangga di Jawa Timur yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 66,58 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum) ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang pada tahun 2012 sebesar 80,31 persen menjadi 83,55 persen pada tahun 2013. Peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi ini tentunya akan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

4. Perumahan

4.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air merupakan salah satu dari kebutuhan dasar makhluk hidup. Air yang dikonsumsi tentunya harus memenuhi standar kesehatan seperti tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau. Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat urgent karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu, air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit.

Tabel 4.22
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih
Di Jawa Timur tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih	93,73	93,42	94,53	95,01
2	Jumlah Rumah Tangga	10.483.105	10.555.938	10.686.958	10.686.958

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*) Air Bersih (AIR MINUM) meliputi : Air kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng meteran, ledeng eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung

Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2010-2013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2010 sekitar 94 persen dan meningkat menjadi sekitar 95 persen di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 5 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

4.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pada era sekarang listrik merupakan kebutuhan pelengkap rumah tangga yang tidak bisa dielakkan, hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan tenaga listrik bahkan listrik dapat meningkatkan produktifitas penghuni rumah tersebut. Disamping itu dengan tersedianya listrik dapat meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Tersedianya listrik misalnya, dapat berpeluang memperpanjang waktu belajar anak sekolah dan membuka kesempatan anggota rumah tangga untuk berproduksi. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

Tabel 4.23
Persentase Rumah Tangga Menurut
Sumber Penerangan Utama Tahun 2010-2013

Sumber Penerangan Utama	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Listrik (PLN & Non PLN)	98.97	99.3	99.57	99.7
Non Listrik	1.03	0.7	0.43	0.3

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Saat ini ketersediaan energi listrik menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses berbagai kebutuhan lain. Semakin berkembangnya sektor kelistrikan akan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Pada empat tahun terakhir (2010-2013) persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan Non PLN) terus meningkat walaupun peningkatannya kecil. Hingga tahun 2013 hampir seluruh rumah tangga di Jawa Timur (99,70 persen) bisa menikmati listrik.

4.3. Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 2009 telah kerjasama dengan KODAM V Brawijaya dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga miskin. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan renovasi terhadap 7.660 unit Rumah Tidak Layak Huni, yang antara lain tersebar di : Kab./Kota Blitar, Kediri (rehabilitasi pasca erupsi Gunung kelud), kab. Jember, Lumajang, Banyuwangi, Tuban, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro dan Ngawi. Dengan demikian selama periode tahun 2009-2014 total telah terlaksana renovasi Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 79.209 unit rumah.

Tabel 4.24
Pelaksanaan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2009-2014

TAHAP		Biaya (Rp. Milyar)	RTLH (Target)	RTLH (Realisasi)	LOKASI (Kab/Kota)
I	APBD 2009	50	10.000	10.000	Jember, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Pacitan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Bangkalan, Trenggalek
II	P-APBD 2009	50	10.000	10.000	Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Pasuruan, Lumajang, Banyuwangi
III	APBD 2010	50	10.000	10.025	Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Lamongan. Gresik, Kota Madiun
IV	P-APBD 2010	25	5.000	5.520	Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Trenggalek, Tuban, Bojonegoro, Bondowoso, Situbondo
V	APBD 2011	50	10.000	10.077	Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Situbondo, Malang, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Banyuwangi
VI	P-APBD 2011	25	5.000	5.029	Sumenep, Jember, Bondowoso, Pacitan, Lumajang, Madiun, Magetan, Bojonegoro, Tuban, dan Gresik
VII	APBD 2012	50	10.000	10.098	Pacitan, Ponorogo, Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sumenep
VIII	P-APBD 2012	7	1.400	1.400	Kediri, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumenep
IX	APBD 2013	60	9.400	9.400	Ponorogo, Ngawi, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Malang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
X	APBD 2014	53	7.660	7.660	Kab/Kota Blitar, Kediri (Rehabilitasi Pasca Erupsi Gunung Kelud), Kab. Jember, Lumajang, Banyuwangi, Tuban, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Ngawi
TOTAL		420	88.460	79.209	

Sumber : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov. Jatim & KODAM V Brawijaya

5. Penataan Ruang

Pelayanan dasar bidang penataan ruang kepada masyarakat yaitu Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Penyediaan informasi tata ruang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2008 melalui Sistem Informasi Tata Ruang (<http://sitr.jatimprov.go.id/>).

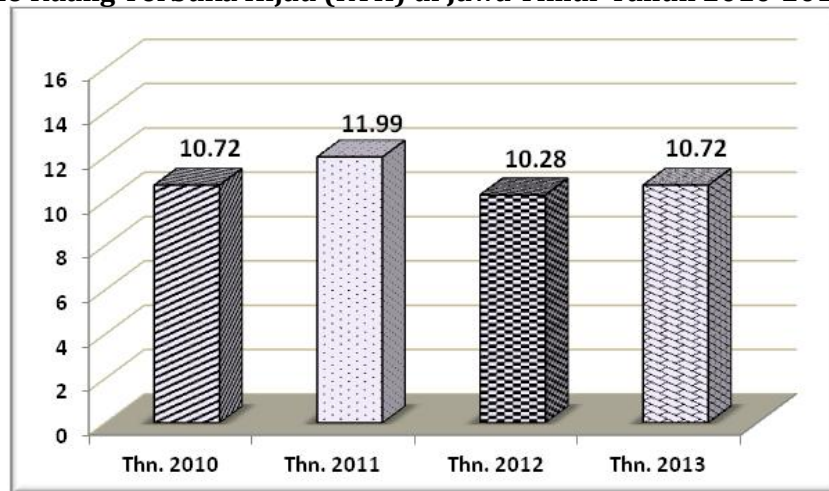
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk penyediaan peta analog sudah ada pada tiap kabupaten/kota walaupun penyediaannya terbatas. Untuk penyediaan peta digital, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan portal pada website yang dapat diunduh pada Sistem Informasi Tata Ruang (<http://sitr.jatimprov.go.id/>).

5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Di tengah berkurangnya RTH di kota-kota besar di Indonesia termasuk Jawa Timur, karena diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada infrastruktur perkotaan lainnya, seperti pusat perbelanjaan, sarana komersial, kawasan permukiman termasuk apartemen, maupun infrastruktur jalan. Konsep dari rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan Hak Pemilikan Lahan (HPL)/ (Hak Guna Bangunan (HGB)).

Hasil pengolahan data dari RTRW tahun 2013 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan data sekunder kabupaten/kota, rasio RTH adalah sebesar 10,72 persen atau 63.802 ha, yaitu perbandingan luas lahan hijauan dibandingkan dengan total luas wilayah perkotaan.

Gambar 4.23
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional, Bappeprov Jatim, dan dinas pertanian

6. Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur secara nasional tercatat sebagai provinsi dengan kualitas perencanaan terbaik, hal ini perlu dikembangkan hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga kualitas perencanaan pembangunan di Jawa Timur merata ke seluruh penjuru provinsi.

Dari data yang telah dihimpun sampai dengan tahun 2014 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sudah menetapkan dengan Peraturan Daerah sebanyak 36 atau 95 persen dan yang belum sebanyak 2 atau 5 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Peraturan Daerah sebanyak 38 atau 100 persen.

7. Perhubungan

7.1. Pertumbuhan Ijin Trayek

Sehubungan dengan sarana transportasi yang paling utama digunakan di Jawa Timur adalah transportasi darat, maka perkembangan rasio ijin trayek mempunyai peran yang cukup penting. Utamanya untuk menciptakan tertib berlalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat.

Tabel 4.25
Rasio Ijin Trayek di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2014

NO	IJIN TRAYEK	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	4.032	3.732	3.700	3.826	3.824
2	Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	1.860	1.874	1.673	1.713	1.810
3	Jumlah Ijin Trayek	7.902	7.617	7.385	7.552	7.648
4	% pertumbuhan Trayek		-3,61%	-3,05%	2,26%	1,27%

Sumber: Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Perkembangan jumlah ijin trayek di Jawa Timur pada tahun 2014 meningkat sebesar 1,27% dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan masih tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum khususnya yang melayani angkutan Antar kota Antar Provinsi, Sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 terdapat penurunan jumlah ijin trayek dikarenakan banyak perusahaan angkutan umum yang tidak melakukan perpanjangan ijin trayek.

7.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Sebagaimana fungsi uji kir yang diarahkan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum untuk beroperasi, diduga uji kir juga bisa menciptakan tertib berlalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat.

Pada tahun 2014 jumlah pengujian kendaraan bermotor/uji kir untuk seluruh angkutan umum di Jawa Timur mencapai 188.694 unit. Jenis kendaraan yang memiliki uji kir terbanyak adalah mobil barang yang mencapai 144.807 unit (76,74 persen), di urutan kedua mobil bus sebanyak 25.039 unit (13,27 persen), diikuti jenis mobil penumpang umum (MPU) sebanyak 7.570 unit (4,01 persen). Sedangkan di urutan keempat dan kelima adalah jenis kereta gandengan sebanyak 6.097 unit (3,23 persen) dan jenis kereta tempelan sejumlah 5.181 unit (2,75 persen).

Tabel 4.26
Jumlah Uji Kir yang Dikeluarkan di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2014

NO	Angkutan Umum	Thn 2010		Thn 2011		Thn 2012		Thn 2013		Thn 2014	
		Jumlah	Jumlah kir	Jumlah	Jumlah kir	Jumlah	Jumlah kir	Jumlah	Jumlah kir	Jumlah	Jumlah kir
1	MPU	11.657	17.098	5.621	6.032	10.515	9.970	12.727	13.556	7.411	7.570
2	Mobil Bus	22.890	36.959	13.125	20.281	23.759	29.448	14.075	28.422	20.716	25.039
3	Mobil Barang	46.780	99.109	34.742	58.354	72.258	109.985	84.324	131.650	106.078	144.807
4	Kereta Gandeng	3.778	7.704	2.003	2.976	4.825	6.536	5.148	5.696	5.902	6.097
5	Kereta Tempelan	4.473	4.748	331	466	3.744	2.651	4.159	4.656	4.769	5.181
Jumlah		89.578	165.618	55.822	88.109	115.101	158.590	120.433	183.980	144.876	188.694

Sumber: Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jawa Timur

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Sedangkan Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya, selanjutnya Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 4.27
Jumlah Pelabuhan Laut, Udara dan Terminal Bus
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

NO	Uraian	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pelabuhan Laut					
	a. Diusahakan	7	7	7	8	8
	b. Tidak diusahakan				34	34
2	Bandar Udara	2	3	3	3	4
3	Terminal Bus					
	a. Tipe A	19	19	19	19	19
	b. Tipe B	29	29	29	29	30
	c. Tipe C	39	39	39	39	38

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

Pada tahun 2014 jumlah pelabuhan laut di Jawa Timur berdasarkan pengusahaannya yang terdiri dari pelabuhan laut diusahakan sebanyak 8 unit dan tidak diusahakan sebanyak 34 unit. Jumlah pelabuhan udara komersial pada tahun 2014 sebanyak 4 unit. Adapun jumlah terminal bus sebanyak 87 unit, terdiri dari 19 unit terminal Tipe A, 30 unit terminal Tipe B dan 38 unit terminal Tipe C.

7.4. Jumlah Armada Angkutan Umum

Pengelolaan Armada Angkutan umum merupakan alternatif pembenahan transportasi yang jika dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas transportasi perkotaan. Selama periode 2010-2014, terjadi peningkatan Perusahaan pariwisata yang cukup tinggi yang diikuti dengan penambahan armada pariwisata yang tinggi pula.

Tabel 4.28
Perkembangan Armada Angkutan Umum Di Jawa Timur

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	ANGKUTAN KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)						
	Perusahaan	Perusahaan	64	64	68	69	71
	Kendaraan / Armada	Unit	1.860	1.149	1.673	1.713	1810
2	ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)						
	Perusahaan	Perusahaan	151	143	144	136	142
	Kendaraan / Armada	Unit	4.032	3.732	3.7	3.826	3824
3	ANGKUTAN PARIWISATA						
	Perusahaan	Perusahaan	167	187	200	240	256
	Kendaraan / Armada	Unit	1.035	1.874	1.396	1.663	1863
4	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT						
	Perusahaan	Perusahaan	35	36	37	41	44
	Kendaraan / Armada	Unit	149	166	174	199	221
5	ANGKUTAN SEWA						
	Perusahaan	Perusahaan	13	14	16	17	17
	Kendaraan / Armada	Unit	48	50	114	182	200
6	Taxi						
	Perusahaan	Perusahaan	8	8	8	11	14
	Kendaraan / Armada	Unit	1.013	1.013	973	977	1046
7	Mobil Penumpang Umum (MPU) / Mikrolet / Mikrobus						
	Kendaraan / Armada	Unit	10.351	10.354	6.471	6.471	6013

Sumber: Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.5. Perkembangan Jumlah *Alarm Early Warning System* (AEWS)

Terpasang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan sistem peringatan dini AEWS di perlintasan rel Kereta Api (KA) yang tidak berpalang pintu.

Tabel 4.29

**Data Perkembangan
Jumlah Alarm Early Warning System (AEWS) Terpasang**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	DAOP 7 Madiun	Titik	43	48	53	62	73
2	DAOP 8 Surabaya	Titik	25	30	35	41	55
3	DAOP 9 Jember	Titik	19	26	32	42	60
JUMLAH		Titik	87	104	120	145	188

Sumber: Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

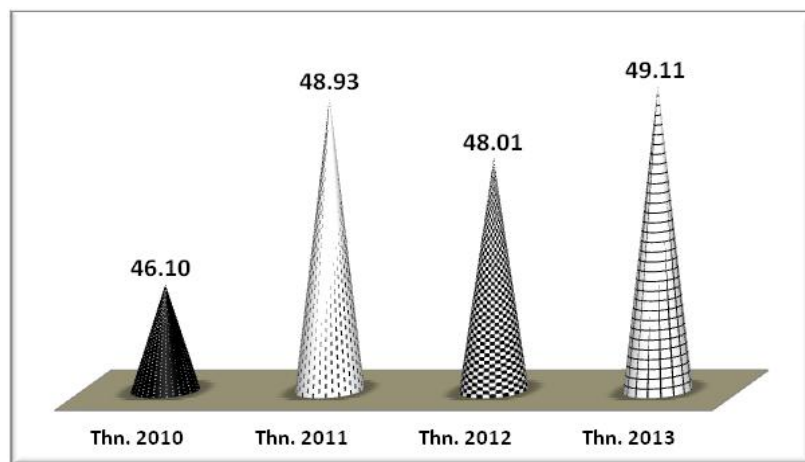
Perkembangan jumlah AEWS terpasang di Jawa Timur periode 2010-2013 menunjukkan peningkatan berturut-turut, yaitu 87 (2010); 104 (2011); 120 (2012); 145 (2013) dan 188 (2014). Peningkatan ini menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api.

8. Lingkungan Hidup

8.1. Persentase penanganan sampah

Sampah telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh hampir semua daerah di Indonesia, terutama daerah perkotaan. Pertambahan penduduk dan meningkatnya aktifitas penduduk turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan volume sampah dari hari ke hari. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang cepat dan tepat agar persoalan sampah bisa diatasi. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Sampah yang sudah dikumpulkan, diangkut ke TPS. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh dinas kebersihan dengan sistem pembagian lokasi, setiap truk pengangkut sampah mempunyai tugas di wilayah tertentu.

Gambar 4.24
Persentase Pengelolaan Sampah di Jatim Tahun 2010-2013



Sumber: Dinas Kebersihan Kab/Kota Se Jawa Timur

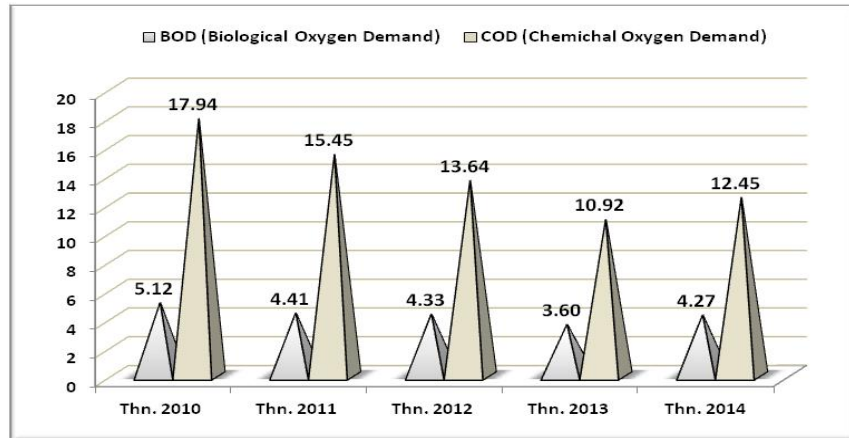
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota, tingkat pelayanan persampahan di Jawa Timur secara umum masih rendah. Cakupan penanganan sampah pada tahun 2013 sebesar 49,11 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 48,01 persen. Peningkatan pengelolaan sampah di Jawa Timur ini merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan persampahan. Upaya untuk pembangunan TPA serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya telah dilakukan oleh pemerintah, tindakan ini juga diikuti dengan upaya-upaya untuk mengurangi volume sampah dan mengolah sampah dengan tepat.

8.2. Kualitas Air Sungai

Sesuai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat ± 1.004 buah dengan jumlah industri potensi pencemar ± 483 buah, dikali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, limbah pertanian dan sebagainya sebesar 10%. Terkait hal tersebut kondisi kualitas air belum mencapai baku mutu lingkungan yang ditetapkan, sehingga perlu adanya penurunan beban pencemar. konsentrasi BOD dan COD sebagai indikator perubahan kualitas air sungai di DAS Brantas. Kedua parameter ini mewakili keterukuran

cemaran material organik yang dihasilkan oleh berbagai jenis sumber pencemar seperti: domestik, industri, pertanian, dan kegiatan usaha lain. Semakin besar nilai BOD dan COD berarti semakin besar pula tingkat pencemarannya.

Gambar 4.25
Kualitas Air Sungai Tahun 2010-2014



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov Jatim

Selama periode 2010-2014, menunjukkan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi BOD dari 5,12 mg/l menjadi 4,27 mg/l dan COD dari 17,94 mg/l menjadi 12,45 mg/l. Capaian kualitas DAS Brantas pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 8% telah terpenuhi dengan baik dengan capaian penurunan BOD sebesar 24,68% dan COD 38,61%, melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 21%. Namun demikian, dapat dilihat bahwa kisaran nilai konsentrasi BOD pada tahun tahun tersebut masih lebih tinggi dari baku mutu air sungai untuk kelas II (3 mg/l) yang berarti memiliki level kualitas air yang lebih rendah dari kelas II.

8.3. Penegakan hukum lingkungan

Ekspansi ekonomi yang dilakukan sebagai upaya memacu pertumbuhan tidak menutup kemungkinan meningkatkan resiko pencemaran lingkungan. Akibat tersebut memberikan dampak pada menurunnya kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya mengatasinya dengan pendekatan hukum.

Tabel 4.30
Jumlah Kasus dan Penegakan Hukum Lingkungan di Jawa Timur
Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	44	76	130	123
2	Jumlah kasus lingkungan yang ada	51	87	164	136
3	Penegakan hukum lingkungan	86,27	87,36	79,27	90,44

Sumber: BLH Jatim dan BLH/Kantor Lingkungan Se Jatim

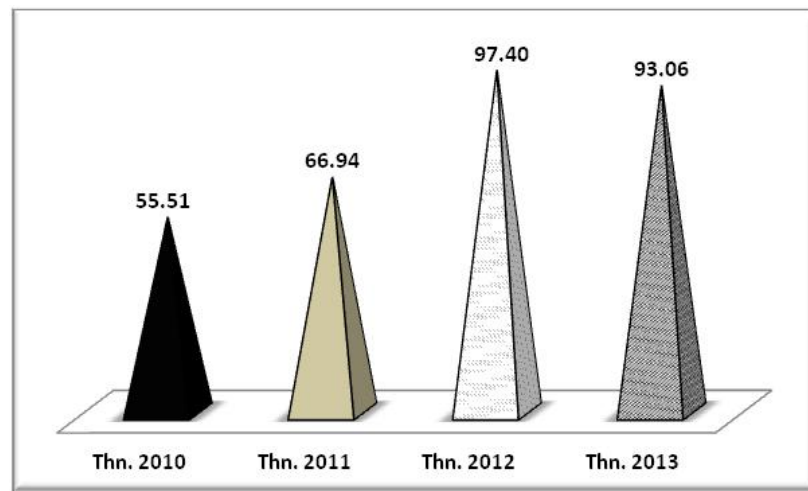
Penegakan hukum terhadap kasus lingkungan pada tahun 2013 mencapai 90,44 persen atau meningkat 11,17 persen poin dari tahun 2012. Peningkatan ini menunjukkan indikasi yang baik terhadap penegakan hukum lingkungan, meskipun jumlah kasus lingkungan yang ada berfluktuatif setiap tahunnya. Upaya yang tegas pada perusahaan yang melakukan pencemaran mampu memberikan efek jera kepada perusahaan, agar menaati amdalnya. Disamping itu, berkurangnya jumlah kasus lingkungan setahun terakhir, menunjukkan bahwa perusahaan atau industri sudah memperhatikan kualitas lingkungan dengan berpedoman pada amdal yang telah dibuat.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

9.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin/pernah kawin dan Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Gambar 4.26
Persentase Penduduk Jawa Timur Yang
Memiliki KTP 2010-2013



Sumber: Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur

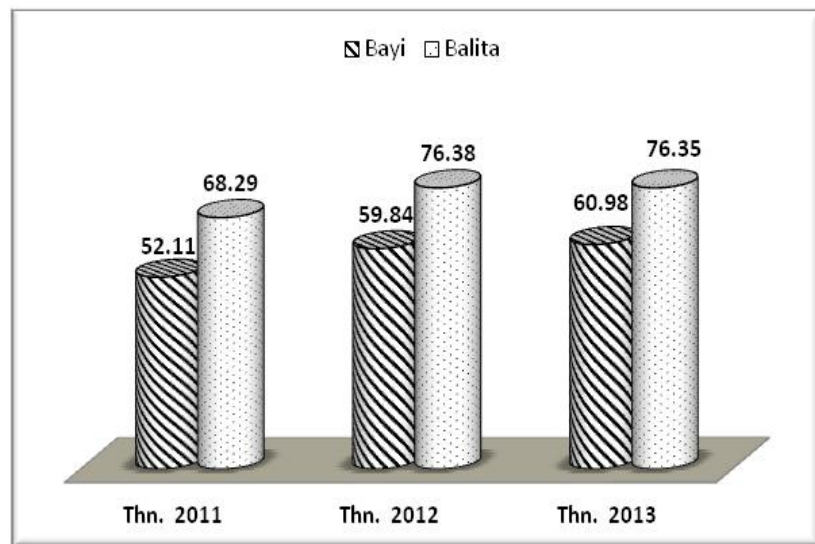
Sementara itu, kesadaran untuk kepemilikan KTP di Jawa Timur cukup tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 penduduk yang mempunyai KTP sebanyak 55,51 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 97,40 persen, sedangkan di tahun 2013 menurun menjadi 93,06 persen dari penduduk kelompok sasaran KTP. Hal ini ditunjang juga dengan dimulainya sistem pencetakan KTP yang lebih baik dan inovatif seperti e-KTP atau KTP Elektronik yang merupakan suatu dokumen kependudukan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi seorang penduduk. Peningkatan kepemilikan KTP selama 3 tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP. Selain itu, pada saat ini pelayanan KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor kecamatan setempat.

9.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Dalam Konvensi Hak Anak salah satu hak anak adalah hak atas identitas. Hak atas identitas disini adalah bahwa anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran. Akta kelahiran merupakan produk catatan sipil yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Oleh karena

itu, kepemilikan produk catatan sipil ini sebagai langkah awal menuju tertib administrasi. Bersamaan itu pula kepemilikan akte kelahiran pada seorang anak akan memberikan kepastian akan hak dan jaminan hukum yang bersangkutan.

Gambar 4.27
Persentase Bayi dan Balita Berakte Kelahiran
Tahun 2011-2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Susenas 2013 jumlah bayi di Jawa Timur yang berakte kelahiran dari catatan sipil sebesar 60,98 persen sedangkan balita yang sudah berakte kelahiran mencapai 76,35 persen. Persentase Bayi berakte kelahiran menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2012, yaitu bayi berakte kelahiran sebesar 59,84 persen sedangkan balita berakte kelahiran sebesar 60,98 persen. Ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan kepemilikan akte kelahiran antara lain yaitu pelayanan akte kelahiran gratis, pelayanan satu atap dan kejelasan dari standar operasional pelayanan serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akte kelahiran. Dengan peraturan yang baru jika akte kelahiran tidak diurus pada batas usia tertentu akan lebih menyulitkan karena memerlukan pengesahan dari pengadilan negeri.

9.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Salah satu upaya pemerintah untuk pendisiplinan administrasi kependudukan antara lain melalui kepemilikan akte nikah bagi penduduk yang sudah menikah. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 tertulis bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Tabel 4.31
Perkembangan Rasio Pasangan berakte Nikah
di Jawa Timur Tahun 2010-2013

Pasangan Berakte Nikah	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Pasangan Berakte Nikah	368.979	351.463	373.162	364.851
Jumlah RumahTangga *)	10.405.506	10.480.608	10.553.183	10.623.127
Rasio per 100 penduduk **)	3.55	3.35	3.54	3.43

Sumber : Kemenag dan Dinas Catatan Sipil Kab/Kota Se Jawa Timur

Keterangan : *) Jumlah RumahTangga Hasil Proyeksi SP2010, BPS

**) Angka diperbaiki

Pasangan yang baru menikah dan beragama Islam dicatat di Kementerian Agama, sedangkan untuk pasangan non muslim pernikahannya dicatat di Dinas Catatan Sipil. Berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, pada tahun 2012 rasio pasangan yang berakte nikah terhadap rumah tangga di Jawa Timur sekitar 3,54 persen dan pada tahun 2013 sekitar 3,43 persen. Pasangan berakte nikah yang dimaksud di sini adalah pasangan baru yang mendapat akte nikah. Kepemilikan akte nikah bagi warga sangatlah penting, sebab dokumen ini sudah menjadi persyaratan bagi pengurusan administrasi kependudukan lainnya, seperti untuk membuat kartu keluarga, akte kelahiran anak, maupun surat ahli waris bagi pewaris.

9.4. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP elektronik atau e-KTP merupakan salah satu dari 3 Program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi Pemutakhiran data penduduk, Penerbitan dan pemberian NIK bagi seluruh penduduk, serta Penerapan KTP elektronik atau e-KTP, yang sekaligus juga merupakan penjabaran visi untuk mewujudkan “tertib administrasi kependudukan di tahun 2015”. e-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.

Pelaksanaan e-KTP di Jawa Timur dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2011-2012 merupakan tahap yang paling rumit yaitu kegiatan yang memerlukan dan melibatkan beberapa instansi pemerintahan sampai di tingkat paling bawah yakni RT/RW, khususnya berkenaan dengan mobilisasi bagi penduduk wajib KTP. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, pelaksanaan e-KTP di Jawa Timur hingga tahun 2013 mencapai 88,05 persen dari jumlah penduduk wajib KTP (29.606.800 jiwa).

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

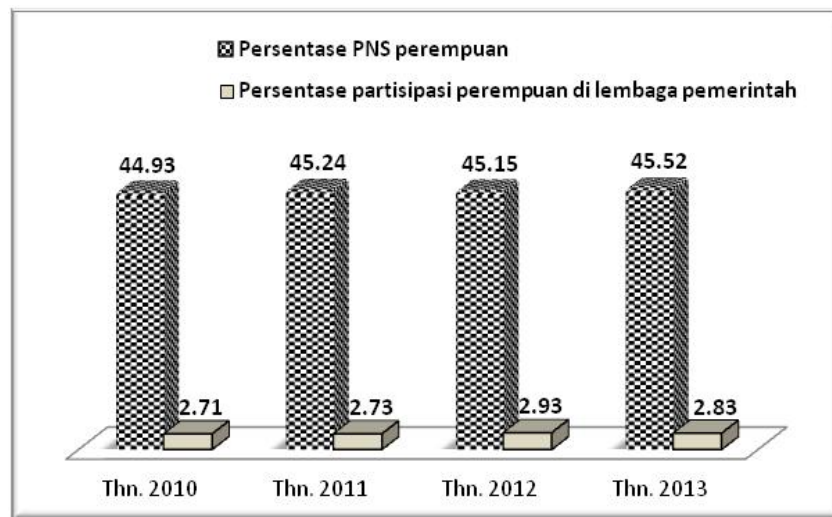
10.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Peran perempuan pada bidang pemerintahan antara lain tercermin dari keterlibatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Secara kuantitas, jumlah PNS perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini bisa dilihat dari persentase PNS perempuan terhadap jumlah seluruh PNS.

Pada tahun 2012 persentase PNS perempuan terhadap jumlah seluruh PNS (termasuk PNS pada instansi vertikal) sekitar 45,15 persen dan meningkat menjadi 45,52 persen pada tahun 2013. Selain itu partisipasi perempuan di pemerintahan dapat ditunjukkan dari

besarnya persentase PNS perempuan di antara pekerja perempuan. Selama empat tahun terakhir partisipasi perempuan di pemerintahan masih berada pada angka sekitar 2 persen, ini berarti masih sedikit perempuan Jawa Timur yang bekerja sebagai PNS.

Gambar 4.28
Perempuan di Pemerintahan Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : BKN Jawa Timur dan BPS Jatim

Keterangan : *) Angka diperbaiki,

**) Angka sementara Tahun 2010-2011 tanpa instansi vertikal

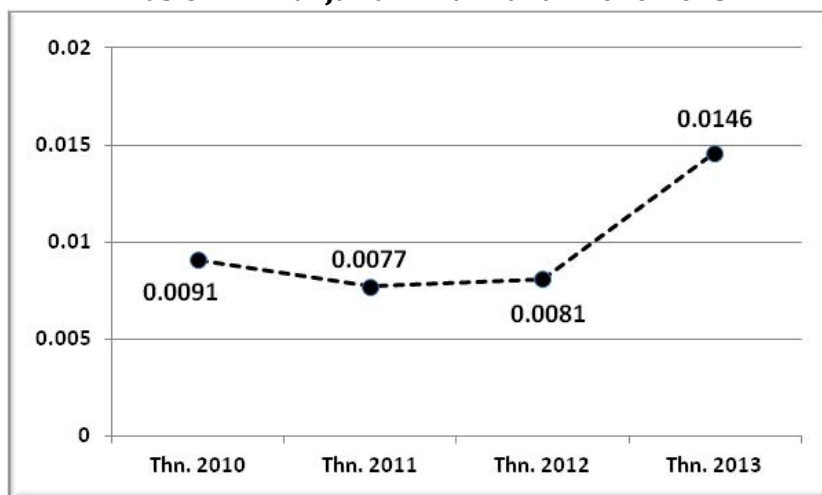
Selama 2 periode terakhir, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Jawa Timur masih kurang dari 30 persen. Akan tetapi, sudah terlihat adanya peningkatan wakil perempuan sebagai anggota DPRD di Jawa Timur dalam periode 2010-2014. Peningkatan persentase perempuan dalam parlemen ini merupakan wujud atas keterbukaan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dan adanya kewajiban memenuhi kuota 30 persen perempuan di Pemilu 2009. Tahun 2013 persentase perempuan dalam keanggotaan DPRD Jawa Timur menjadi sekitar 15,17 persen.

10.2. Rasio KDRT

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan beberapa hal antara lain faktor ekonomi, psikologis, pendidikan yang rendah, pihak ketiga atau faktor pemicu lainnya. Rasio KDRT di Jawa

Timur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 cenderung menurun, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.29
Rasio KDRT di Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : Polres Kab/Kota Se Jatim dan Polda Jatim

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tahun 2010 rasio KDRT terhadap jumlah rumah tangga di Jatim sebesar 0,0091. Angka rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 1000 rumah tangga terdapat sekitar 9 kejadian KDRT di tahun 2010. Angka rasio KDRT ini menunjukkan penurunan pada 2 tahun terakhir. Pada tahun 2012 rasio KDRT mencapai 0,008 atau sekitar 8 kejadian KDRT pada setiap 1000 rumah tangga. Namun pada tahun 2013 rasio KDRT mencapai 0,0146 atau sekitar 14 kejadian KDRT pada setiap 1000 rumah tangga. Salah satu faktor yang memicu terjadinya peningkatan kasus KDRT adalah kurangnya kesadaran korban KDRT untuk melaporkan diri ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan.

10.3. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia kurang dari 18 tahun, sementara konvensi ILO menetapkan, batas minimal usia pekerja di bawah umur adalah 15 tahun. Dalam tulisan ini data pekerja di bawah

umur menggunakan konsep penduduk usia 10 – 17 tahun yang bersumber dari hasil pengolahan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sasenas) sejak tahun 2009 – 2013. Dengan demikian persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 10 - 17 tahun terhadap jumlah pekerja usia 10 tahun ke atas.

Berdasarkan seris data yang diolah dari Hasil Susenas, jumlah pekerja di bawah umur pada tahun 2013 sebanyak 316.912 orang atau menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 210 orang. Dengan demikian persentase tenaga kerja di bawah umur pada tahun 2013 sebesar 1,67 yang berarti dari 100 pekerja berusia 10 tahun ke atas terdapat sekitar 2 orang penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja. Dari sejumlah pekerja di bawah umur, sebagian besar adalah anak laki-laki dengan sex ratio sebesar 182,85 yang berarti dari 100 pekerja perempuan terdapat 183 pekerja laki-laki. Adanya jumlah pekerja di bawah umur menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum optimal, dan masih adanya anggapan bahwa anak memiliki nilai ekonomi, sehingga anak seringkali dieksploitasi.

Tabel 4.32
Jumlah Pekerja Di bawah Umur (10-17 Tahun)
Tahun 2009-2013 di Jawa Timur

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Pekerja di bawah umur
2009	296.346	151.207	447.553	2,41
2010	286.104	151.987	438.091	2,31
2011	214.060	122.380	336.440	1,80
2012	209.111	108.011	317.122	1,67
2013	204.870	112.042	316.912	1,67

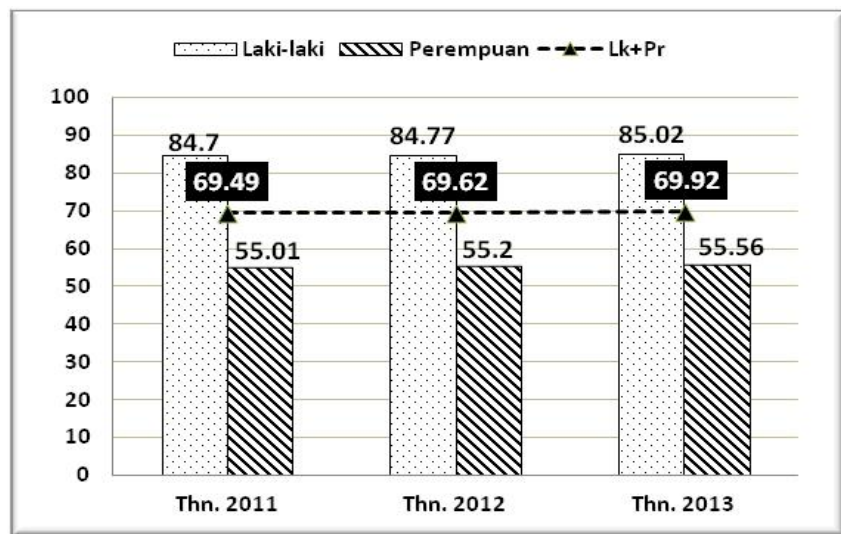
Sumber: Olah data Susenas, BPS Jawa Timur

10.4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada umumnya perempuan mempunyai peran ganda, yaitu selain aktif dalam kegiatan ekonomi juga berperan mengasuh anak-anak mereka. Oleh karena itu aktifitasnya dalam kegiatan ekonomi menjadi tidak penuh dibandingkan laki-laki yang kodratnya sebagai kepala

keluarga berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Seberapa besar peran perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari besaran angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK), yang merupakan persentase jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan.

Gambar 4.30
TPAK Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011-2013 di Jawa Timur



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013 (Hasil Sakernas, 2013), angka TPAK perempuan sebesar 55,56 yang berarti dari 100 penduduk usia kerja perempuan terdapat sekitar 56 orang perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan pencari kerja). Dari tahun ke tahun angka TPAK perempuan mengalami peningkatan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan pendidikan, dimana perempuan dapat mengoptimalkan perannya sehingga lebih produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya.

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

11.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Jatim 37,476 juta orang dan terus

tumbuh sehingga pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 38,363 juta orang. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sekitar 0,644 persen (2012 – 2013) dan rata-rata jumlah anak tiap keluarga yang diukur melalui TFR (SDKI2012, BPS RI) sebesar 2,3 atau rata - rata keluarga memiliki lebih dari dua anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil SP2010 di Jawa Timur terdapat sekitar 1.500 bayi lahir setiap harinya, sehingga dalam 1 tahun hampir mencapai 600.000 kelahiran. Hal Ini yang harus menjadi perhatian, dan terus diupayakan untuk diturunkan, agar tiap keluarga juga Pemerintah daerah di Jatim memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk, membangun keluarga maupun sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2008 – 2012, diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga pada periode 2010 – 2012 di Jawa Timur sekitar 4 orang. Jika diasumsikan bahwa tiap keluarga merupakan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Jawa Timur sekitar 2 - 3 anak, angka tersebut sejalan dengan estimasi angka TFR yang dihitung oleh BPS yaitu sebesar 2,3 pada tahun 2012.

Tabel 4.33
Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di Jawa Timur
Tahun 2011 – 2013

No.	Tahun	Jumlah Keluarga	Jumlah Anggota Keluarga	Rata-rata Anggota per keluarga
1.	2011	11.201.698	49.207.876	4,39
2.	2012	11.325.197	49.385.288	4,36
3.	2013	11.464.627	38.425.306	3.35

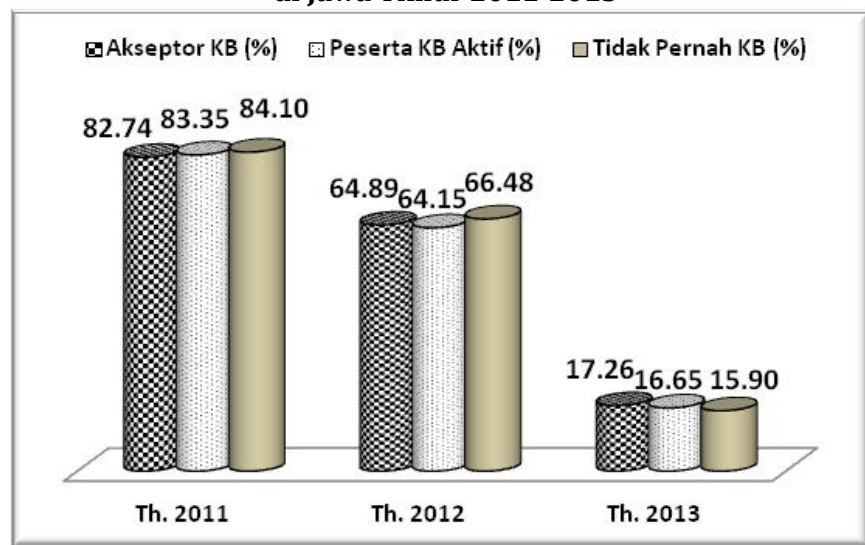
Sumber : BKKBN Propinsi Jawa Timur

11.2. Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif

Salah satu program pemerintah dalam hal kependudukan adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program

Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana dicanangkan untuk mengatur jarak kelahiran. Rasio akseptor KB digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap penggunaan alat/cara KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor KB) menunjukkan adanya keberhasilan program KB dan pengendalian jumlah penduduk.

Gambar 4.31
Persentase Akseptor KB dan Peserta KB
di Jawa Timur 2011-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tiga tahun terakhir, jumlah pasangan usia subur (wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin) di Jawa Timur mengalami peningkatan, dari 7.884.543 pasangan pada tahun 2011, menjadi 7.908.398 pasangan pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 menjadi 7.935.174 pasangan. Dilihat dari persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB dalam tiga tahun terakhir terus meningkat dari 82,74 persen di tahun 2011 menjadi 84,10 persen pada tahun 2013. Disisi lain masih terdapat pasangan usia subur di Jawa Timur yang tidak pernah ikut KB namun jumlahnya terus menurun dari 17,26 persen pada tahun 2011 turun menjadi 15,90 persen pada tahun 2013.

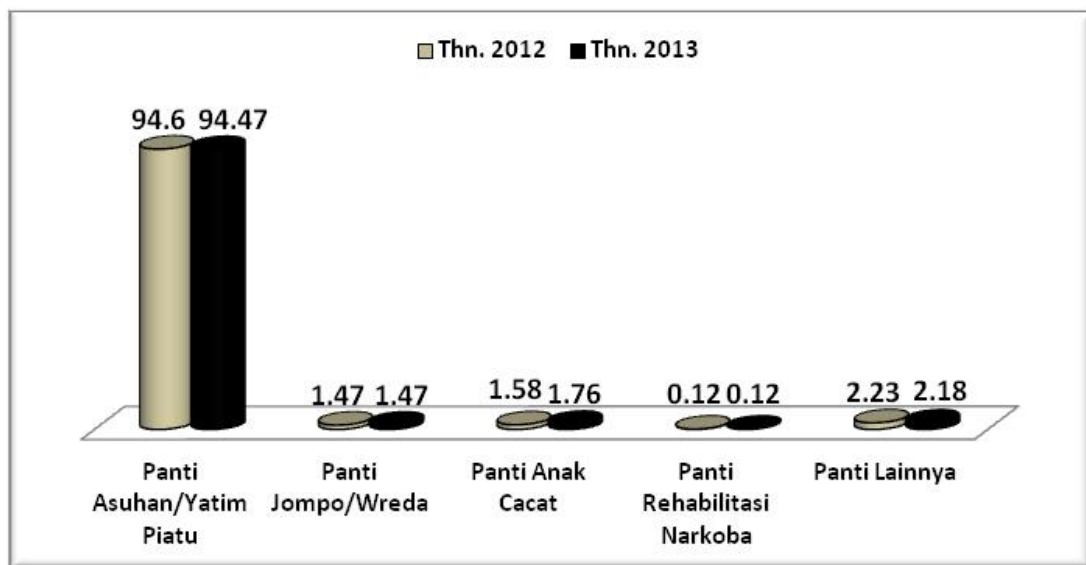
12. Sosial

12.1. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi

Keberadaan panti sosial sebagai sarana pengembangan, pemulihan, bimbingan dan latihan serta terapi ditujukan untuk menciptakan kemandirian penerima manfaat. Kondisi ini akan mendorong penerima manfaat untuk menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Jumlah panti sosial yang ada di Jawa Timur tahun 2013 mencapai 1.700 panti yang tersebar di 38 kab/kota. Sementara itu jumlah panti sosial tahun 2012 sebanyak 1.704 panti. Panti sosial menurut jenisnya dapat dikategorikan dalam 5 jenis yaitu panti asuhan, panti jompo, panti anak cacat, panti rehabilitasi dan lainnya. Pada tahun 2013, sebesar 94,47 persen diantara panti sosial yang ada merupakan panti asuhan/yatim piatu dan hanya sebagian kecil panti rehabilitasi narkoba (0,12 persen), kondisi tersebut secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.32
Persentase Panti Sosial Menurut Jenisnya
di Jawa Timur Tahun 2012-2013



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

12.2. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai faktor penyebab keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain kemiskinan, bencana alam dan marginalisasi. Pertumbuhan PMKS yang mendapat bantuan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.34
Jumlah PMKS Mendapat Bantuan di Jawa Timur
Tahun 2010-2013

NO	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	297.934	278.327	258.328	325.504
2	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	1.590.149	1.625.431	2.008.036	2.136.487
3	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	18,74	17,12	12,86	15,24

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2012 jumlah PMKS yang mendapat bantuan mengalami penurunan, sementara pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 2013, pertumbuhan PMKS yang mendapat bantuan mengalami peningkatan 26,00 persen dibandingkan tahun 2012.

12.3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di suatu wilayah membutuhkan penanganan segera. Upaya ini dilakukan agar efek sosial yang lebih besar dapat dihindari. Di antara permasalahan sosial yang ada di antaranya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pemerintah berusaha seoptimal mungkin untuk menanggulangi PMKS. Upaya tersebut ditempuh dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PMKS dapat hidup secara normal. Jumlah PMKS yang tertangani mulai tahun 2010 s/d tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.35
Jumlah PMKS di Jawa Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Jml PMKS yang tertangani	293.242	284.65	300.596	391.602
2	Jml PMKS yang ada	2.417.452	2.568.850	2.524.612	2.575.676
3	Persentase Penanganan PMKS	12,13	11,08	11,91	15,20

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, jumlah PMKS yang tertangani mencapai 391.602 jiwa di tahun 2013. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 30,28 persen dari pada tahun 2012. Sementara itu jumlah PMKS selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, penanganan PMKS sebesar 15,20 persen. Angka ini menunjukkan setiap 100 penyandang PMKS yang ada 15 PMKS yang sudah tertangani. Penanganan PMKS selama tahun 2010-2011 menunjukkan persentase penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2011-2013. Hal ini menandakan, dalam tiga tahun terakhir kemampuan pemerintah dalam menangani PMKS semakin meningkat.

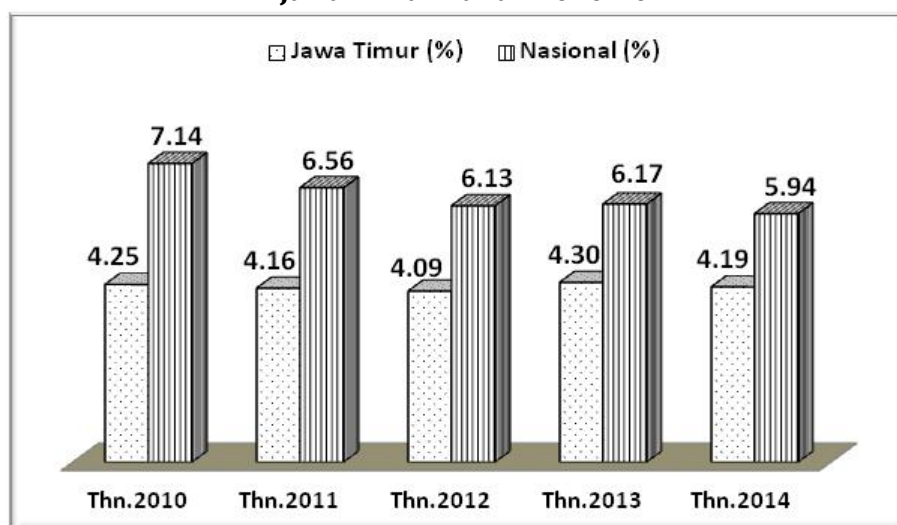
13. Ketenagakerjaan

13.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka secara nasional dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan, dari 7,14 menjadi 5,94%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur, persentase pada tahun 2010 sebesar 4,25% dan sebesar 4,19% pada tahun 2014. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat pada table berikut :

Gambar 4.33
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Di Jawa Timur Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Prov Jatim

Penurunan TPT pada tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa keadaan ketenaga kerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2014 digambarkan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja yang berimbang menurunkan tingkat pengangguran terbuka selama setahun terakhir. Jumlah angkatan kerja berkurang sekitar 282,45 ribu orang dalam kurun waktu setahun (Agustus 2013-Agustus 2014). Penduduk yang bekerja berkurang 247,40 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara jumlah penganggur juga turun sebanyak 35,05 ribu orang jika dibanding keadaan setahun sebelumnya. Namun demikian, jika dibandingkan antara hasil Sakernas Februari 2014 dengan Sakernas Agustus 2014, ada kenaikan persentase pengangguran, yaitu dari 4,02 persen (Februari 2014) menjadi 4,19 persen (Agustus 2014).

13.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan data BPS Agustus 2014 jumlah angkatan kerja di Jawa Timur sebesar 20,149 juta, dengan jumlah yang berkerja sebesar 19,305 juta dan penganggurnya sebesar 843 ribu. Sedangkan TPAK-nya sebesar 68,12 persen artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, 68 orang diantaranya adalah angkatan kerja.

13.3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013 Jawa Timur, diketahui bahwa pada tahun 2013 jumlah pencari kerja di kab/kota sebanyak 1.066.234 orang, terdiri dari 749.561 orang laki-laki dan 316.673 orang perempuan. Dibandingkan tahun 2012, jumlah pencari kerja mengalami peningkatan sebanyak 49.105 orang atau sebesar 4,83%. Selanjutnya dari jumlah pencari kerja tersebut, sebanyak 443.415 orang tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2013. Dengan demikian persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap seluruh pencari kerja hampir mencapai 41,59 persen.

Tabel 4.36
Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
Di Jawa Timur Tahun 2012-2013

No	Uraian	Tahun	
		2012	2013
1	Pencari Kerja	1.017.129	1.066.234
2	Penempatan Tenaga Kerja	474.989	443.415
(%) Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan		46.7	41,59

Sumber: Disnakertransduk dan Sakernas 2012-2013

13.4. Perkara Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena ada 4 (empat) hal, yaitu (1) perselisihan hak, (2) perselisihan kepentingan, (3) perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta (4) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Tabel 4.37
Capaian Kinerja Keadaan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial
yang Masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial
Tahun 2012 - 2014

No	Jenis Perselisihan	Thn. 2012		Thn. 2013		Thn. 2014	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Perselisihan Hak	11.00	7.86	15.00	10.14	16.00	11.51
2	Perselisihan Kepentingan	4.00	2.86	5.00	3.38	5.00	3.60
3	Perselisihan PHK	125.00	89.29	128.00	86.49	117.00	84.17
4	Perselisihan Antar SP/SB dlm 1 Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.72
Total		140	100.00	148	100.00	139	100.00

Sumber : Bidang Hub. Industrial dan Syarat Kerja, Disnakertransduk Prov. Jatim

Perselisihan hubungan industrial yang tidak bisa diselesaikan melalui Perjanjian Bersama di tingkat kabupaten/kota masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pada tahun 2014, kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 139 kasus, atau turun 6,08% dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 148 kasus. Dilihat dari jenis perselisihannya, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masih mendominasi, yaitu sebanyak 117 kasus di tahun 2014 atau 84,17%. Sedangkan kejadian mogok/unjuk rasa di tahun 2014 naik menjadi 15 kasus dari sebelumnya 11 kasus di tahun 2013.

14. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

14.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan.

Tabel 4.38
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur
Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Koperasi	23.159	29.145	29.159	30.741	30.866
2	Jumlah Koperasi Aktif	19.437	25.149	25.449	27.031	27.156
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	83,93	86,29	87,28	87,93	87,98

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Keragaan Koperasi pada akhir tahun 2014 dibandingkan dengan kondisi di akhir tahun 2013. Pada triwulan keempat 2014, jumlah koperasi bertambah 125 unit dari jumlah di triwulan keempat tahun 2013. Persentase koperasi aktif meningkat sebesar 0,46% dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2013. Pertambahan jumlah koperasi tersebut sejalan dengan penambahan jumlah anggota, manager dan karyawan. Penambahan tersebut menunjukkan masih tingginya partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perkoperasian. Sedangkan dari sisi produktivitas, kinerja koperasi dapat dilihat melalui peningkatan volume usaha serta Sisa Hasil Usaha (SHU). Di sisi volume usaha terjadi peningkatan sebesar 21,01%, namun di sisi SHU terjadi peningkatan sebesar 33,16%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui SHU yang dihasilkan.

15. Penanaman Modal

15.1. ICOR

Apabila produksinya ingin dapat berjalan lancar, maka suatu perusahaan harus memperhatikan kondisi perekonomian secara makro dengan membuat keputusan mengenai stok berdasarkan kondisi tersebut. Misalnya : dengan adanya kenaikan bahan baku maka perusahaan melakukan penimbunan bahan baku. Jika hal tersebut dilakukan, maka perubahan stok

Tabel 4.39
ICOR Jawa Timur
Tahun 2010-2013

Tahun	ICOR
2010	3,30
2011	3,09
2012	2,92
2013	3,10

Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur

dapat dimasukkan sebagai komponen pembentukan modal (investasi). Dalam pendekatan mikro, diasumsikan, perusahaan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok baik untuk bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi untuk kelancaran produksi.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, hasil penghitungan ICOR tahun 2010 mencapai angka 3,03. Sementara dari tahun 2011 sampai tahun 2013 masing-masing angka ICOR sebesar 3,09; 2,92 dan 3,10. Pada tahun 2012 angka ICOR Jawa Timur sebesar 2,92, artinya untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 2,92 unit. Sedangkan tahun 2013 ICOR Jawa Timur mencapai 3,10, artinya untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 3,10 unit. Pernyataan ini dapat diartikan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2013 diperlukan investasi sebesar 3,10 milyar rupiah.

15.2. Kinerja Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tabel 4.340
Perkembangan Investasi Berdasarkan Izin Prinsip
Tahun 2012-2014

No	Investasi	Thn. 2012			Thn. 2013			Thn. 2014		
		Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja
1	PMA	185	30,40	18.099	174	74,69	18.099	183	74,91	24.720
2	PMDN	312	46,31	41.266	252	38,95	41.266	514	35,72	37.832
TOTAL		497	76,71	59.365	426	113,64	59.365	697	110,63	62.552

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Capaian persentase nilai izin prinsip PMA dan PMDN pada Tahun 2014 sebesar Rp. 110,63 Trilyun atau 2,65% menurun jika dibandingkan Tahun 2013 sebesar 48,1% atau Rp. 113,64 Trilyun. Terjadi penurunan minat investasi di Jawa Timur disebabkan oleh kondisi perekonomian dunia yang belum stabil dengan inflasi di Indonesia mencapai 6,5% dan harga minyak dunia yang mencapai \$ 50 per barrel serta kondisi politik di Indonesia yang baru menyelenggarakan Pilkada Anggota Legislatif tingkat Pusat sampai kabupaten/kota dan Pemilihan Presiden. Secara rinci PMA mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 74,69 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 74,91 Trilyun (Tahun 2014) sedangkan PMDN mengalami penurunan yaitu dari Rp. 38,95 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 35,72 Trilyun (Tahun 2014). Rincian PMA sebanyak 183 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 74,91 Trilyun, menyerap tenaga kerja sebanyak 24.720 tenaga kerja; PMDN sebanyak 514 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 35,72 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 37.832 tenaga kerja.

Tabel 4.41
Perkembangan Investasi Berdasarkan Realisasi Investasi
Tahun 2012-2014

No	Investasi	Thn. 2012			Thn. 2013			Thn. 2014		
		Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Tenaga Kerja
1	PMA	264	25,13	39.952	278	33,63	47.466	245	19,29	36.725
2	PMDN	213	28,73	48.642	234	34,85	52.530	192	42,55	41.203
3	PMDN NON FAS	67,508	79,57	319.225	66,488	76,58	501,768	124,714	83,19	413.325
TOTAL		67.985	133,43	407.819	67.000	145,06	502.205	125.151	145,03	491.253

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Capaian persentase peningkatan realisasi investasi PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas pada Tahun 2014 sebesar Rp. 145,03 Trilyun atau 0,02% menurun jika dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp. 145,06 Trilyun. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian dunia yang belum stabil dengan inflasi di Indonesia mencapai 6,5% dan harga

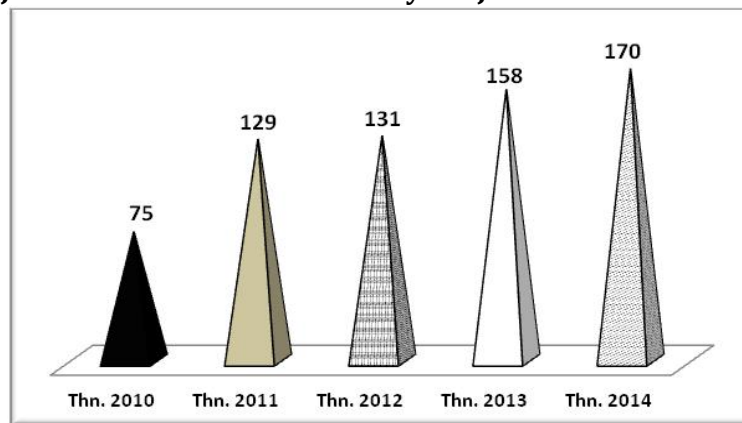
minyak dunia yang mencapai \$50 per barrel serta kondisi politik di Indonesia yang baru menyelenggarakan Pilkada Anggota Legislatif tingkat Pusat sampai kabupaten/kota dan Pemilihan Presiden. Secara rinci PMA mengalami penurunan dari Rp. 33,63 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 19,29 Trilyun (Tahun 2014) sedangkan PMDN mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 34,85 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 42,55 Trilyun (Tahun 2014) dan PMDN Non Fasilitas mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 76,58 Trilyun (Tahun 2013) menjadi Rp. 83,19 Trilyun (Tahun 2014). Sedangkan rincian PMA sebanyak 245 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 19,29 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 36.725 tenaga kerja; PMDN sebanyak 192 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 42,55 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 41.203 tenaga kerja; PMDN Non Fasilitas sebanyak 124.714 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 83,19 Trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 413.325 tenaga kerja.

16. Kebudayaan

16.1. Jumlah Pergelaran/Penampilan kesenian

Selama 5 tahun terakhir (2010-2014) Jumlah Pergelaran/Penampilan kesenian menunjukkan berkembang yang menggembirakan. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 Jumlah Pergelaran/Penampilan kesenian sebanyak 75 event, pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup besar, menjadi 170 event.

Tabel 4.34
Jumlah Festival Seni dan Budaya di Jatim Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Semakin seringnya pelaksanaan event tersebut memberikan ruang berkembangnya seni dan budaya masyarakat, sehingga tidak akan mengalami kepunahan. Di samping itu juga dapat mengeliminir tergerusnya budaya sendiri di tengah gencarnya budaya asing yang masuk di dalam masyarakat.

16.2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Kemajuan seni dan budaya di suatu daerah bergantung kepada pemerintah dan masyarakat setempat. Penghargaan terhadap keberadaan kesenian dan budaya oleh pemerintah khususnya dapat dilakukan dengan penyelenggaraan event-event kesenian dan budaya. Perhatian pemerintah tersebut tidak cukup hanya itu saja, tapi ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya perlu juga disiapkan atau bila perlu memberikan bantuan kepada para kelompok seni. Perkembangan jumlah sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.42
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Jawa Timur
Tahun 2010-2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Sarana Penyelenggaran Seni dan Budaya	1.258	1.260	1.260	1.315	1.322

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2010 sebanyak 1258 bertambah 64 sarana pada tahun 2014 sebanyak 1322 sarana. Ditinjau dari sejarah, daerah yang berkembang sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan daerah pusat kerajaan yang notabene juga sebagai pusat perkembangan kebudayaan pada era dan jamannya.

16.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, keperdulian terhadap cagar budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri.

Tabel 4.43
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Jawa Timur
Tahun 2010-2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	7.056	7.056	7.056	7.138	7.141
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki Daerah	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
Persentase Benda Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	69,09	69,09	69,09	69,89	69,92

Sumber: Dinas/Kantor Budpar Kab/Kota Se Jawa Timur

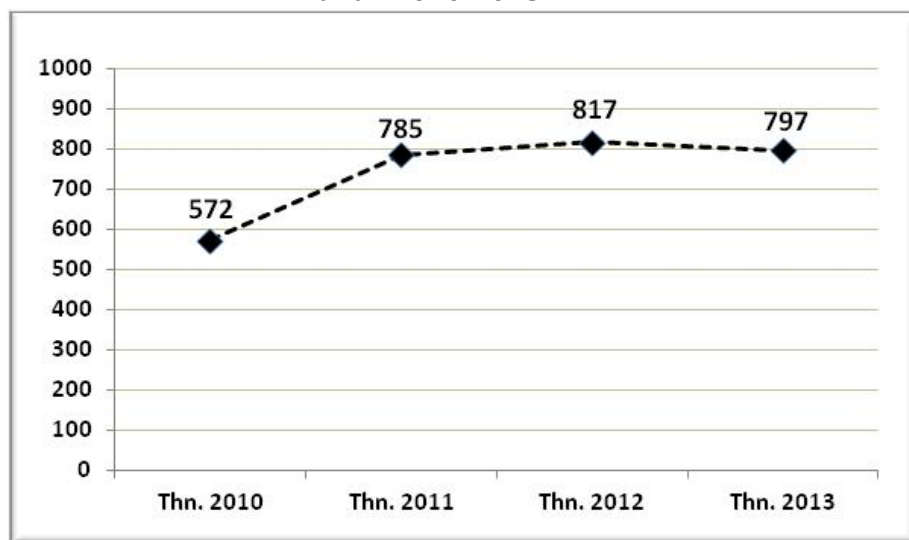
Jumlah benda situs dan cagar budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014). Pada tahun 2010, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 69,09 persen dari kondisi eksisting yang ada. Sementara itu, pada tahun 2011 dan 2012 persentase pelestarian cagar budaya sebesar 69,09 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 69,92 persen. Angka 69,92 persen menunjukkan bahwa setiap 100 cagar budaya yang ada disuatu wilayah sebanyak 70 cagar budaya sudah dilestarikan.

17. Kepemudaan dan Olahraga

17.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemuda adalah suatu generasi yang di pundaknya terbebani berbagai macam harapan dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan. Peran serta pemuda dalam pembangunan dapat teraktualisasi dengan berbagai ragam pada bidang olah raga, akademik dan perkumpulan. Perkumpulan pemuda yang terbentuk dalam masyarakat biasanya membangun suatu komunitas dalam bentuk organisasi pemuda.

Gambar 4.35
Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2013



Sumber: Bakesbangpol Kabupaten/Kota

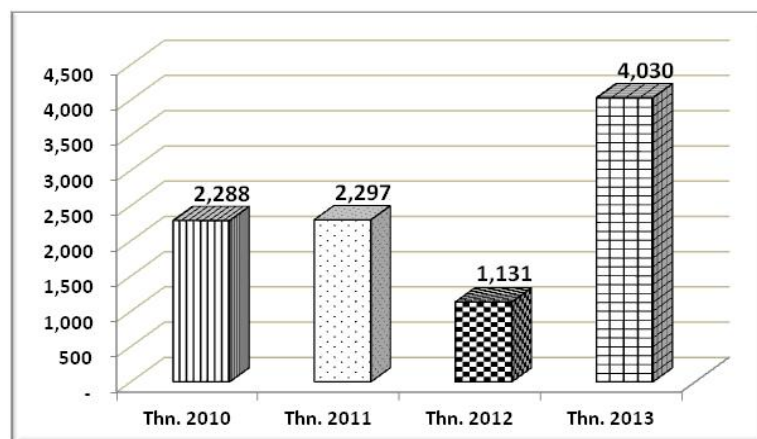
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat sebanyak 572 organisasi kepemudaan di tahun 2010, kemudian menjadi 785 pada tahun 2011 dan 817 organisasi kepemudaan di tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 20 organisasi kepemudaan dari tahun 2012.

17.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Kegiatan olahraga merupakan salah satu kebutuhan penting manusia untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kemajuan prestasi olahraga juga dapat mengangkat kehormatan nama bangsa. Keberadaan organisasi olahraga akan mendorong masyarakat melakukan kegiatan olahraga dan tidak menutup kemungkinan berprestasi mengharumkan nama bangsa.

Di Indonesia, tercatat sekitar 50 organisasi induk cabang olahraga yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Berdasarkan data dari KONI Jawa Timur, pada tahun 2010 sampai tahun 2012 terdapat sekitar 43 cabang organisasi olahraga di Jawa Timur, meskipun ada beberapa cabang organisasi olah raga yang mengalami pengembangan sampai menjadi 54 sub cabang olah raga. Keberadaan cabang organisasi tersebut di setiap kabupaten/kota tidak sama, karena sangat tergantung pada eksistensi olahraga tersebut pada tiap daerah.

Gambar 4.36
Jumlah Organisasi Olahraga di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

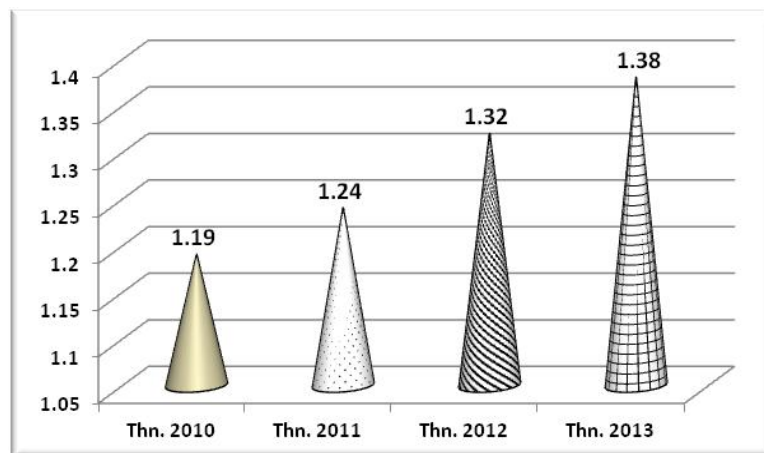
Berdasarkan data yang dihimpun dari instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah organisasi olahraga pada tahun 2011 organisasi olah raga sekitar 2.297 yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan data pada tahun 2012 sebanyak 1.131 yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan pada tahun 2013 sebanyak 4.030 organisasi olah raga yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota.

18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

18.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Ketentraman dan kertertiban umum merupakan syarat mutlak yang dibutuhkan untuk menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah yang berperan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP di Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Satpol PP di Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 4.37
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Jawa Timur
Tahun 2010-2013



Sumber : Satpol PP dan Bakesbangpol Kab/Kota Se Jawa Timur
Catatan : Th 2010-2013 dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk
Hasil Proyeksi SP2010

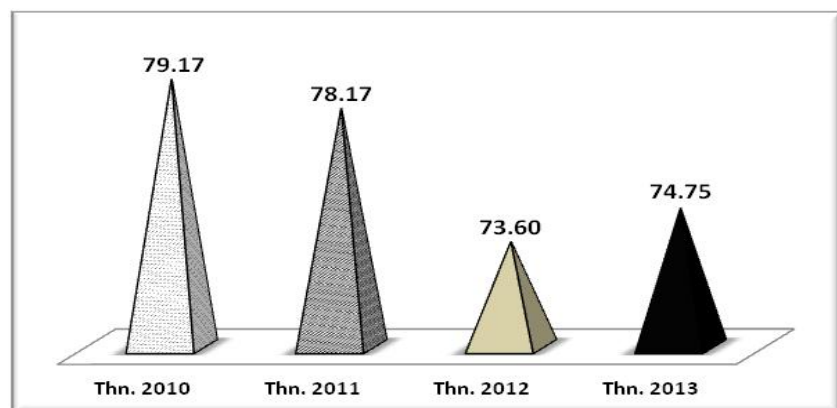
Berdasarkan data dari Bakesbangpol dan Satpol PP di 37 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 rasio polisi pamong paraja per 10.000 penduduk sebesar 1,38 atau dengan kata lain dalam 100.000 penduduk terdapat sekitar 13 sampai 14 orang Satpol PP yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Rasio ini terlihat

sangat kecil bila dibandingkan dengan tugas yang diemban sangatlah berat. Karena itu dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Satpol PP senantiasa melakukan koordinasi dengan aparat keamanan agar mampu melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional guna mencegah timbulnya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban.

18.2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Istilah Linmas (Perlindungan Masyarakat) seringkali hanya dikaitkan dengan fungsi Linmas dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Pertahanan Sipil secara formal dibentuk pada tanggal 19 April 1962 yang selanjutnya dijadikan sebagai hari ulang tahun Pertahanan Sipil. Pada tahun 1972, berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1972, organisasi Pertahanan Sipil disempurnakan menjadi organisasi Pertahanan Sipil (HANSIP) dan organisasi Perlawanan Rakyat dan Keamanan Rakyat (WANKAMRA) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankamrata.

Gambar 4.38
Rasio Jumlah Linmas di Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : Bakesbangpol dan Satpol PP Kab/Kota Se Jatim
Catatan : Th 2010-2013 dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk
Hasil Proyeksi SP2010

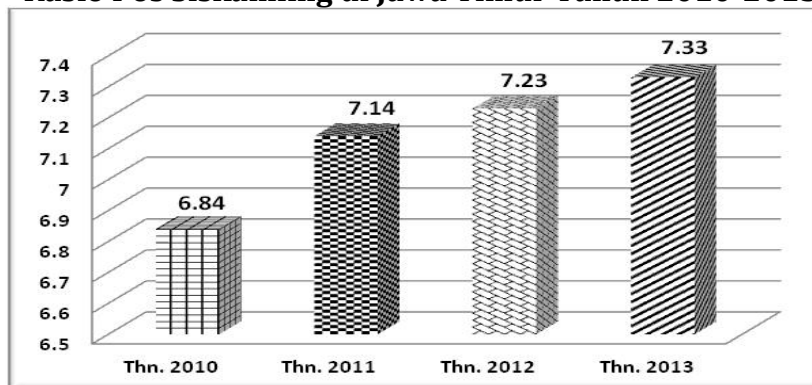
Data Bakesbangpol dan Satpol PP di 37 Kab/Kota Se Jawa Timur menunjukkan rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 74,75. Angka tersebut berarti sekitar 75 orang Linmas bertugas membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk 10.000 penduduk di suatu wilayah. Kehadiran

Linmas di masyarakat sangatlah penting dan kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat dan bangsa selama ini dirasakan secara positif. Linmas tidak saja tampil dalam keseharian kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam momen strategis yang bersifat nasional seperti Pemilihan Umum, sebab itu kiranya tidaklah berlebihan bila secara khusus jajaran Pemerintah Daerah memberikan atensi besar terhadap pengembangan Satuan tersebut dalam kaitan pengembangan kelembagaan maupun dalam konteks pengembangan sumber daya manusianya.

18.3. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan sistem keamanan yang terbentuk dari kesadaran masyarakat, keamanan dan ketertiban lingkungannya. Secara umum pengertian Siskamling adalah suatu kegiatan atau upaya untuk mencegah gangguan kamtibmas, yang dikembangkan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan peduli serta meningkatkan kepekaan dan daya tangkal masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

Gambar 4.39
Rasio Pos Siskamling di Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : Bakesbangpol dan Satpol PP Kab/Kota Se Jatim
Catatan : Th.2010-2012 Angka diperbaiki

Berdasarkan data dari Bakesbangpol dan Satpol PP di 27 Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur, selama 4 tahun terakhir rasio jumlah Pos Siskamling terus menunjukkan peningkatan. Seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak pula pemukiman penduduk yang memerlukan pos siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Pada tahun 2012 rasio jumlah pos siskamling per jumlah desa adalah sebesar 7,23 dan meningkat menjadi 7,33 pada tahun 2013. Hal ini berarti selama 3 tahun terakhir ini setiap desa/kelurahan di Jawa Timur terdapat sekitar 7 Pos Siskamling. Keberadaan Pos Siskamling dan kegiatan siskamling di kawasan pemukiman penduduk sangat mendukung untuk menekan tindak kriminalitas sehingga tercipta suasana yang aman dan tertib.

18.4. Kemiskinan

Proses pembangunan merupakan proses transformasi masyarakat secara keseluruhan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup sejalan dengan proses transportasi ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan baik absolute maupun relatif. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan secara integral merupakan bagian dari problematika pembangunan yang harus ditanggulangi.

Gambar 4.40
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2010-2014 menunjukkan kecenderungan menurun. Jumlah penduduk miskin nampak terjadi penurunan dari 15,26 persen pada tahun 2010 menjadi 12,28 persen pada tahun 2014. Jumlah penduduk

miskin di Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 6,02 juta orang, Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2014 yang berjumlah 4,89 juta, berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 1,12 juta orang. Turunnya persentase penduduk miskin selama periode tahun 2010-2014, sebagai wujud upaya keras Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan memberikan konstribusi penurunan kemiskinan dengan tetap meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19.1. Persentase Ormas/LSM terdaftar

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non pemerintah yang independen dan mandiri. Organisasi ini juga bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga negara atau pemerintahan maupun partai politik. LSM dapat bergerak dalam berbagai bidang sesuai dengan tujuannya misalkan bidang pendidikan, ekonomi dan masyarakat. Dalam prakteknya pemerintah dapat bekerjasama dengan LSM dalam mengisi pembangunan.

Tabel 4.44
Persentase Ormas/LSM terdaftar
di Jatim Tahun 2013-2014

Uraian	Satuan	Tahun	
		2013	2014
Persentase peningkatan Ormas / LSM yang terdaftar	(%)	3,31	1,15

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa timur

Persentase peningkatan Ormas/LSM yang terdaftar tahun 2013 ditargetkan 5 persen terealisasi 3,31 persen atau tercapai 873 Ormas/LSM yang terdaftar dan pada tahun 2014 ditargetkan 5 persen terealisasi 1,15 persen atau tercapai 883 Ormas/LSM yang terdaftar.

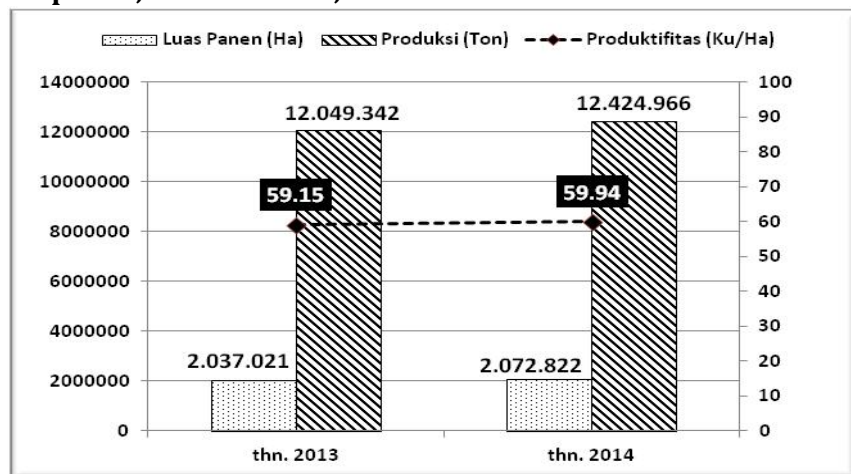
b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

1.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Di Jawa Timur beras adalah bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk. Karenanya, beras menjadi komoditas strategis dan politis dalam pembangunan nasional secara umum, khususnya dalam pembangunan sektor pertanian di Jawa Timur. Keberadaannya menjadi suatu keharusan sehingga pemerintah senantiasa menitikberatkan perhatiannya pada jenis komoditas ini.

Gambar 4.41
Luas panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2013 – 2014



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Produksi padi Jawa Timur berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2014 sebesar 12,42 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebesar 375,62 ribu ton (3,12 persen) dibanding tahun 2013 dengan produksi padi sebesar 12,05 juta ton. Peningkatan produksi ini disebabkan luas panen yang meningkat 35,80 ribu hektar dari 2,04 juta hektar tahun 2013 menjadi 2,07 juta hektar di tahun 2014 (Kab. Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto) dan meningkatnya produktivitas di 38 kabupaten / kota sebesar 0,79 kuintal/hektar dari 59,15 kuintal/hektar menjadi 59,94 kuintal/hektar.

1.2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dari hasil penghitungan tahun 2014 menurut tahun dasar 2010, total nilai PDRB sektor pertanian sebesar Rp. 211,51 triliun atau dengan kontribusi sebesar 13,73 persen terhadap total nilai PDRB Jawa Timur. Apabila dilihat pada masing-masing sub sektor, penyumbang terbesar adalah sub sektor tanaman pangan sebesar 4,52 persen, disusul sub sektor peternakan 2,74 persen dan sub sektor perikanan 2,43 persen, sedangkan terkecil sub sektor jasa pertanian dan perburuan dengan kontribusi sebesar 0,15 persen.

Tabel 4.45
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Jawa Timur
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		13.48	13.28	13.48	13.46	13.73
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10.97	10.83	10.75	10.61	10.76
	a. Tanaman Pangan	4.64	4.50	4.53	4.49	4.52
	b. Tanaman Hortikultura	1.35	1.33	1.22	1.16	1.20
	c. Tanaman Perkebunan	2.10	2.11	2.15	2.08	2.14
	d. Peternakan	2.73	2.74	2.70	2.73	2.74
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.43	0.44	0.52	0.53	0.54
3	Perikanan	2.08	2.01	2.21	2.32	2.43

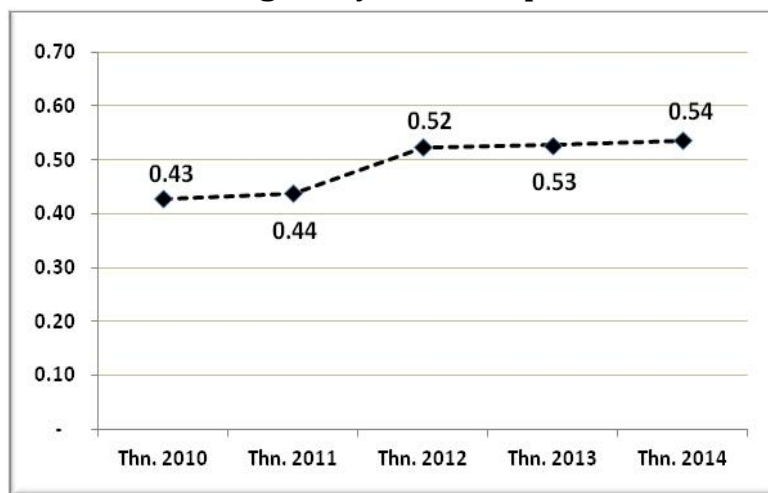
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2. Kehutanan

2.1. Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Penebangan kayu Terhadap PDRB

Subsektor kehutanan dan penebangan kayu mencakup kegiatan yang dilakukan di areal hutan oleh perorangan dan badan usaha, yang mencakup usaha penanaman, pemeliharaan dan penebangan kayu, serta pengambilan hasil hutan lainnya. Dari hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 diketahui bahwa nilai PDRB subsektor kehutanan dan penebangan kayu sebesar Rp. 8,26 triliun terhadap total PDRB sektor pertanian.

Gambar 4.42
Kontribusi Subsektor Kehutanan dan
Penebangan kayu Terhadap PDRB



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi subsektor ini cenderung meningkat. Secara berurutan kontribusinya tahun 2010 sebesar 0,43 persen, tahun 2011 sebesar 0,44 persen, tahun 2012 sebesar 0,52 persen, tahun 2013 sebesar 0,53 persen, dan tahun 2014 sebesar 0,54 persen. Meningkatnya kontribusi subsektor kehutanan lima tahun terakhir tersebut lebih disebabkan oleh meningkatnya produksi kayu tanaman hutan rakyat khususnya kayu sengon.

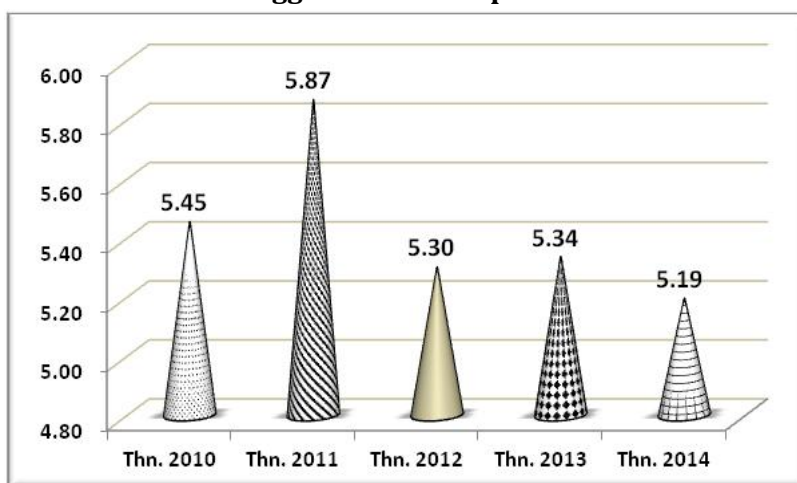
3. Energi dan Sumberdaya Mineral

3.1. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB

Sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari subsektor pertambangan migas, pertambangan non migas dan subsektor penggalian. Hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 diketahui bahwa nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 22,67 triliun atau dengan kontribusi sebesar 2,00 persen terhadap total nilai PDRB Jawa Timur.

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini berfluktuasi dan bahkan cenderung menurun. Secara berurutan kontribusinya tahun 2010 sebesar 5,45 persen, tahun 2011 sebesar 5,87 persen, tahun 2012 sebesar 5,30 persen, tahun 2013 sebesar 5,34 persen dan tahun 2014 sebesar 5,19 persen.

Gambar 4.43
Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan
Penggalian Terhadap PDRB



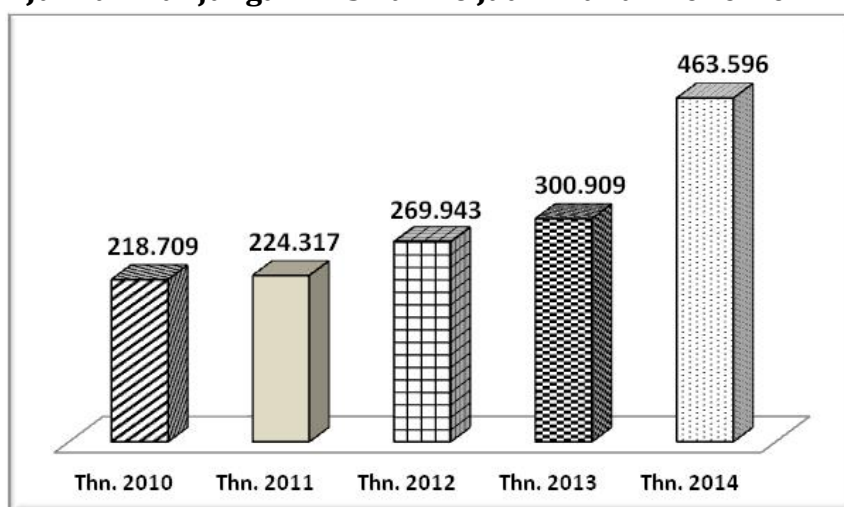
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

4. Pariwisata

4.1. Kunjungan Wisata

Potensi wisata di Provinsi Jawa Timur masih mengundang daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, khususnya wisatawan manca negara (wisman). Kunjungan wisatawan mancanegara periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan, yaitu masing-masing 218.709 wisman (2010); 224.317 wisman (2011), 269.943 wisman (2012); dan 300.909 wisman (2013), dan pada tahun 2014 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 463.596 wisman.

Gambar 4.44
Jumlah Kunjungan Wisman ke Jatim Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

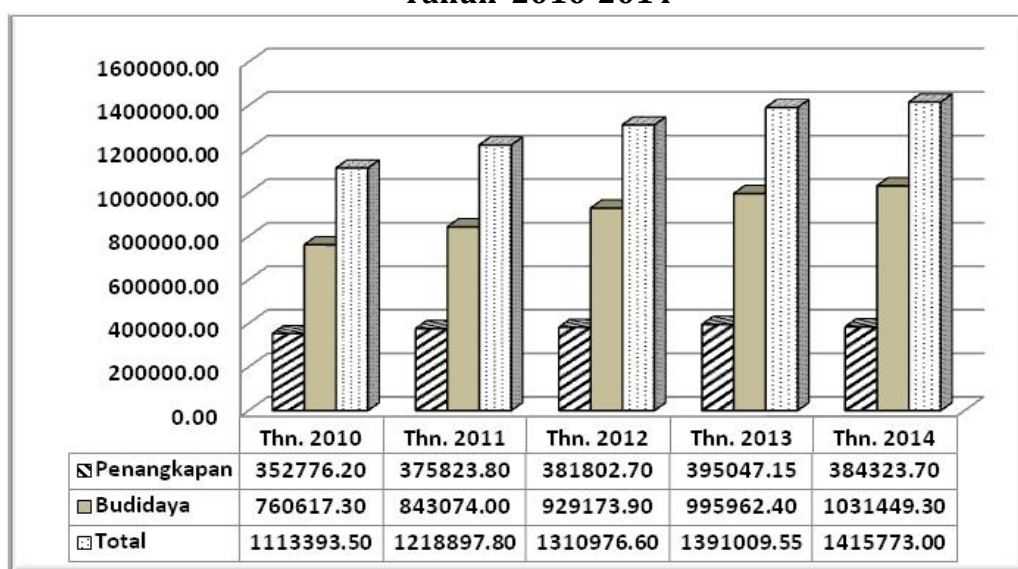
Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisman yang datang ke Jawa Timur tetap merasa nyaman.

5. Kelautan dan Perikanan

5.1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina padi, karamba, dan japung. Produksi perikanan pada tahun 2010 mencapai 1.113.393,5 ton, kemudian meningkat sebesar 9,48 persen pada tahun 2011 menjadi 1.218.897,8 ton, meningkat lagi pada tahun 2012 sebesar 7,55 persen menjadi 1.310.976,6 ton. Kecendrungan peningkatan juga terjadi pada dua tahun terakhir, pada tahun 2013 meningkat sebesar 6,10 persen menjadi 1.391.009,55 ton dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 1,78 persen menjadi 1.415.773 ton.

Gambar 4.45
Perkembangan Produksi Perikanan di Jawa Timur
Tahun 2010-2014

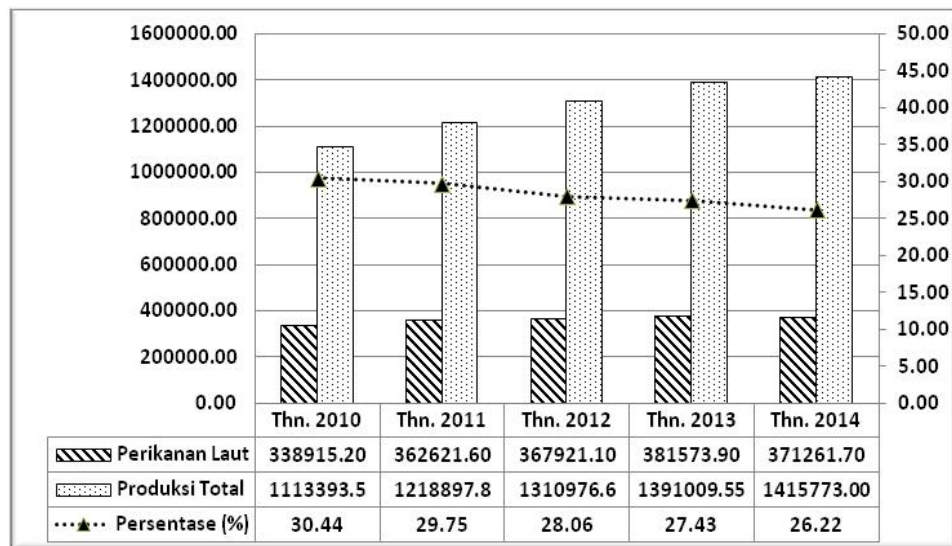


Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur

5.2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dianalogikan dengan produksi Perikanan Tangkap di laut, dimana kelompok ini konstribusinya terhadap produksi perikanan total juga semakin menurun.

Gambar 4.46
Perkembangan Produksi Perikanan di Jawa Timur
Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur

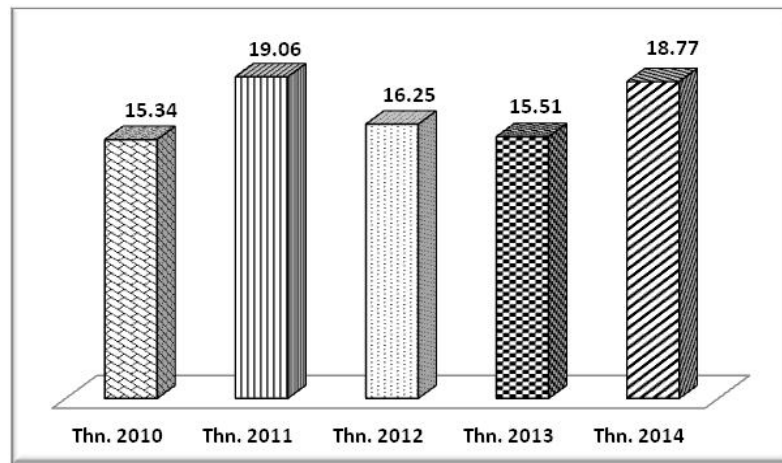
Pada tahun 2010 produksinya mencapai 30,44 persen, kemudian menurun konstribusinya tahun 2011-2013 menjadi 29,75 persen (2011); 28,06 (2012); 27,43 (2013) dan 2014 konstribusinya berkurang lagi hanya menjadi 26,22 persen.

6. Perdagangan

6.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan ekspor Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun memasuki tahun 2012 nilai ekspor Jawa Timur tampak menurun dibanding tahun 2011, yaitu sebesar 14,76 persen atau dari US \$ 19,06 miliar di tahun 2011 menjadi US \$ 16,25 miliar di tahun 2012 dan tahun 2013 masih turun lagi sebesar 4,56 persen menjadi 15,51 miliar. Sementara di tahun 2014 ekspor Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 18,77 miliar.

Gambar 4.47
Perkembangan Ekspor di Jawa Timur
Tahun 2010-2014 (US \$ Milyar)



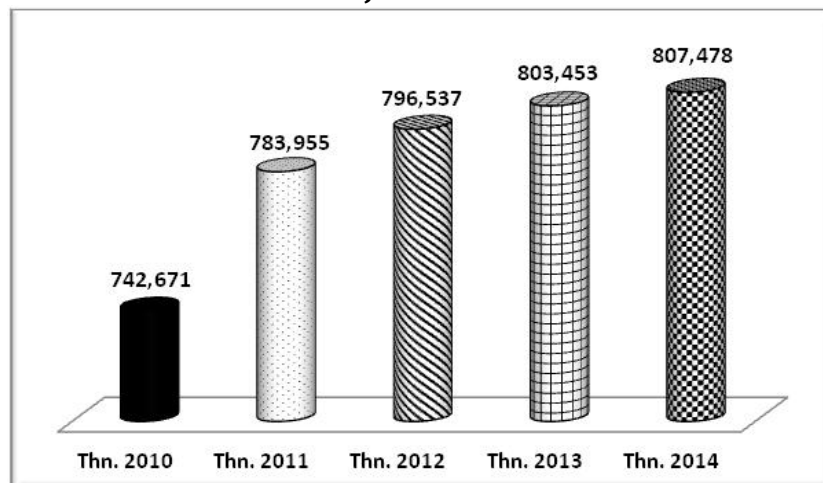
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

7. Perindustrian

7.1. Pertumbuhan Industri

Jumlah perusahaan industri terus meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 807.478 unit padahal tahun 2010 baru tercatat sebanyak 742.671 unit. Ini berarti perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 8,73 persen.

Gambar 4.48
Perusahaan Industri di Jawa Timur Tahun 2010-2014



Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur

Perkembangan jumlah industri tersebut juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan pemerataan kesempatan berusaha.

Hal ini terlihat pada penyerapan tenaga kerja industri di Jawa Timur yang mengalami peningkatan dari 3.115.681 orang di tahun 2013 atau mengalami penambahan sebanyak 17.368 orang atau meningkat 0,56 % pada tahun 2014. Sedangkan Nilai produksinya juga mengalami peningkatan, senilai 1.473 milyar rupiah atau 0,70 %, yaitu dari 211.159 milyar rupiah pada tahun 2013 menjadi 212.632 milyar rupiah pada tahun 2014.

8. Ketransmigrasian

8.1. Transmigran Swakarsa Mandiri

Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan masalah kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan. Perkembangan Penempatan Transmigrasi asal Jawa Timur mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.46
Capaian Kinerja Penempatan Transmigrasi Asal Jawa Timur
Tahun 2012-2014

NO	JENIS PENEMPATAN	THN 2012				THN 2013				THN 2014			
		KK		JIWA		KK		JIWA		KK		JIWA	
		JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)	50	7.47	146	7.27	31	3.89	100	4.26	15	4.59	44	4.57
2	Transmigrasi Umum (TU)	619	92.53	1,861	92.73	766	96.11	2,250	95.74	312	95.41	919	95.43
JUMLAH		669	100.00	2,007	100.00	797	100.00	2,350	100.00	327	100.00	963	100.00

Sumber : Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa penempatan transmigrasi dari Jawa Timur tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 58,97% untuk jumlah Kepala Keluarga (KK), dari semula 797 KK di tahun 2013 menjadi 327 KK di tahun 2014. Secara terinci, penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dari semula sebanyak 31 KK dan

100 jiwa, pada tahun 2014 menjadi 15 KK (turun 51,61%) dan 44 jiwa (turun 56%). Demikian pula dengan penempatan Transmigrasi Umum (TU), dimana semula di tahun 2013 telah menempatkan 766 KK dan 2.250 jiwa, pada tahun 2014 menjadi 312 KK (turun 59,27%) dan 919 jiwa (turun 59,16%). Penempatan Transmigrasi Umum tersebut sebagian besar merupakan kontribusi dari penempatan transmigran asal Jawa Timur di *Food Estate* kawasan Tanjung Buka, Delta Kayan Kabupaten Bulungan. Penempatan ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan terkait kerjasama penempatan sejumlah 600 KK, yang ditempatkan mulai tahun 2012 s.d 2014, dengan jumlah penempatan sebanyak 200 KK per tahun.

III. ASPEK DAYA SAING DAERAH

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi per kapita merupakan rata-rata pengeluaran/konsumsi rumah tangga per kapita sebulan. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk (konsumsi atau pengeluaran rumah tangga pada prinsipnya merupakan total konsumsi/pengeluaran dari setiap anggota rumah tangga), untuk makanan dan bukan makanan, dibagi dengan jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis bahan makanan, termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah. Data konsumsi rumah tangga per kapita diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang merupakan survei rumah tangga dan dilakukan secara sampel setiap tahun.

Rata-rata konsumsi per kapita penduduk di Jawa Timur dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam empat tahun terakhir 2010-2013 mengalami peningkatan yang semula Rp. 408.038 per kapita

sebulan di tahun 2010 menjadi Rp. 586.407 per kapita sebulan di tahun 2013. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita ini, karena belum tentu menjadi gambaran peningkatan kesejahteraan.

Tabel 4.47
Rata-rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi dan Status Wilayah di Jawa Timur Tahun 2010-2013 (Rupiah per Bulan)

Tahun/ Status Wilayah		Makanan	Bukan Makanan	Total
2010	Kota	244.457	224.564	469.021
	Desa	189	118.345	307.345
	Kota+Desa	223.539	184.499	408.038
2011	Kota	281.107	316.024	597.131
	Desa	208.082	164.619	372.701
	Kota+Desa	242.829	236.661	479.49
2012	Kota	299.505	361.654	661.159
	Desa	222.828	179.511	399.339
	Kota+Desa	259.403	264.822	524.225
2013	Kota	335.29	379.968	715.258
	Desa	260.822	207.946	468.768
	Kota+Desa	296.362	290.045	586.407

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 4.48
Persentase Pengeluaran Rumah tangga Dirinci Menurut Pengeluaran Makanan & Non Makanan Jawa Timur Tahun 2010-2013

Tahun	Persentase		
	Makanan	Non Makanan	Total
2010	54,78	45,22	100,00
2011	50,64	49,36	100,00
2012	47,40	52,60	100,00
2013	50,19	49,81	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Proporsi pengeluaran non makanan penduduk Jawa Timur tahun 2013 sebesar 49,81 persen, relatif lebih rendah sekitar 2,79 persen dibanding tahun 2012. Hal ini mungkin adanya kenaikan harga-terutama barang kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makanan yang diduga dampak dari kebijakan pemerintah dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan Gas. Dengan adanya kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari tersebut maka pendapatan masyarakat lebih cenderung dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makanan daripada non makanan.

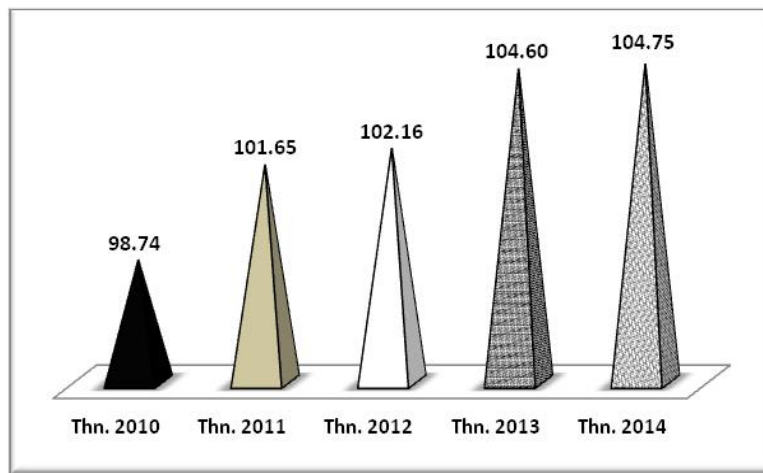
Selama periode empat tahun terakhir (2010–2013) rata-rata pengeluaran penduduk Jawa Timur untuk kebutuhan non makanan mengalami peningkatan, yaitu dari 45,22 persen pada tahun 2010 menjadi 49,81 pada tahun 2013. Kondisi ini mengindikasikan, meskipun secara umum pendapatan penduduk semakin meningkat namun laju inflasi yang berdampak pada kenaikan harga-harga barang lebih tinggi dibanding peningkatan pendapatan. Hal ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

2. Pertanian

2.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Gambar 4.49
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 - 2014



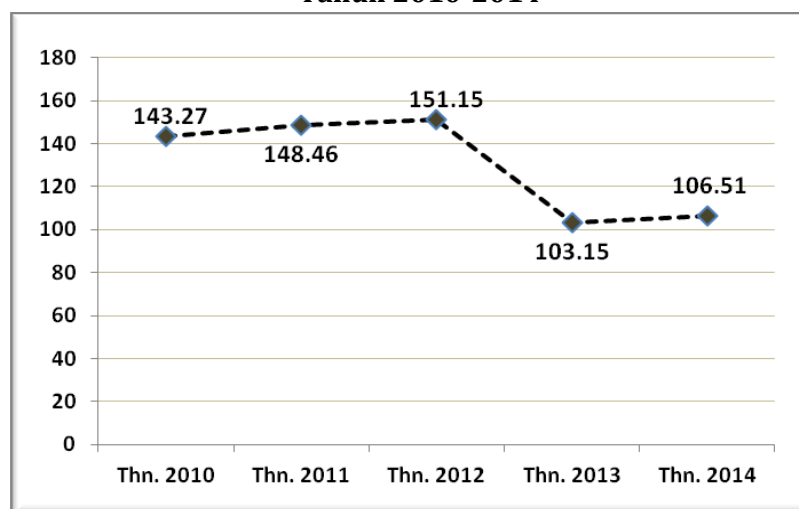
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen dibanding tahun 2013 yaitu dari 104,60 menjadi 104,75. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani (7,35 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (7,20 persen). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2014, secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2013.

2.2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN pada periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan.

Gambar 4.50
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,26 persen dibanding tahun 2013 yaitu dari 103,15 menjadi 106,51. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima nelayan (10,90 persen) lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (7,40 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk nelayan terhadap barang konsumsi rumah tangga nelayan dan biaya produksi tahun 2014, secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2013.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Perhubungan

1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/1000 kendaraan)

Untuk mengantisipasi risiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran ratio panjang jalan per jumlah kendaran menjadi salah satu ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan. Dengan asumsi bahwa semakin pendek ratio panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang.

Tabel 4.49
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013

No.	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kab/Kota	37.966,02	37.971,38	37.971,38	40.806,90
2	Jumlah Kendaraan Bermotor	9.554.530	10.645.817	11.529.441	12.158.409
Rasio (km/1000 kendaraan)		3,97	3,57	3,29	3,36

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kab/Kota dan Dinas Perhubungan Kab/Kota

Pada tahun 2013 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Jawa Timur tercatat 3,36 km untuk setiap 1000 kendaraan bermotor, kondisi ini masih lebih padat tahun 2012 yang mencapai 3,29 km per 1000 kendaraan bermotor. Ratio ini mencerminkan tingkat padatnya arus lalu lintas di Jawa Timur. Karena kondisi ini berarti setiap 3,36 km jalan yang ada, diisi dengan kendaraan bermotor sebanyak 1000 kendaraan. Kepadatan ini disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor lebih cepat bila dibandingkan dengan perkembangan panjang jalan yang ada. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat kenyamanan berkendara dan ikut memberikan andil bagi keselamatan berkendara.

1.2 Perkembangan Jumlah Penumpang Kereta Api

Minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan massal Kereta Api sangat besar, terutama nampak menjelang mudik dan arus balik pasca hari raya.

Terselesaikannya jalur rel *Double Track* di Pantura Jawa, juga patut dilihat sebagai peluang terjadinya perpindahan angkutan barang dari angkutan jalan menjadi angkutan Kereta Api yang lebih efisien. Hal tersebut juga menjadi potensi bisnis dibidang perkeretaapian untuk tumbuh besar. Saat ini sudah dimungkinkan investor dapat membangun perusahaan kereta tersendiri, baik kereta penumpang maupun kereta barang. Sudah saatnya Jawa Timur menentukan jenis prasarana angkutan transportasi massal apa yang akan digunakan, berbasis Tol atau berbasis Kereta Api.

Tabel 4.50
Data Perkembangan Jumlah Penumpang Kereta Api
Tahun 2010-2014

NO	JENIS KERETA API	JUMLAH PENUMPANG (ORANG/TAHUN)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	DAOP 7 MADIUN					
	KA EKSEKUTIF	204,458	202,338	195,308	218,421	223,240
	KA BISNIS	223,406	213,974	151,397	86,364	125,208
	KA EKONOMI / LOKAL	3,077,492	3,030,733	2,667,016	2,490,631	2,751,067
	SUB TOTAL	3,505,356	3,447,045	3,013,721	2,795,416	3,099,515
2	DAOP 8 SURABAYA					
	KA EKSEKUTIF	807,673	687,523	769,103	852,508	931,052
	KA BISNIS	594,118	470,994	482,463	452,149	408,470
	KA EKONOMI	2,058,422	1,654,491	1,324,517	1,399,262	1,649,913
	KA LOKAL	9,257,265	8,194,395	6,606,633	4,691,904	5,869,708
	SUB TOTAL	12,717,478	11,007,403	9,182,716	7,395,824	8,859,143
3	DAOP 9 JEMBER					
	KA EKSEKUTIF	108,429	118,334	149,957	121,897	124,121
	KA BISNIS	165,736	161,117	135,042	127,283	119,260
	KA EKONOMI	792,614	776,320	790,778	602,903	739,324
	KA LOKAL	705,719	689,080	699,786	601,058	772,414
	SUB TOTAL	1,772,498	1,744,851	1,775,563	1,453,141	1,755,119
TOTAL		17,995,332	16,199,299	13,972,000	11,644,381	13,713,777

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

1.3 Arus Penumpang melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa Timur

Pelabuhan penumpang adalah pelabuhan yang dibangun untuk memberikan fasilitas bagi kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian. Pada pelabuhan penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang mencakup fasilitas-fasilitas seperti kantor imigrasi, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran, dan sebagainya. Barang-barang yang perlu dibongkar muat tidak begitu banyak, sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran keluar masuknya penumpang dan barang, sebaiknya jalan masuk dan keluar dipisahkan. Penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedang barang-barang melalui dermaga.

Untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan, Pemerintah Pusat telah menunjuk Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) yang bertugas mengembangkan bisnis dari sebuah pelabuhan dan juga, berwenang mengaudit kinerja dari sebuah pelabuhan umum.

Tabel 4.51
Arus Penumpang melalui 4 (empat)
Pelabuhan Laut Utama di Jawa Timur

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	TANJUNG PERAK						
	NAIK	Orang	442,338	470,972	432,901	337,282	356,274
	TURUN	Orang	405,473	514,445	466,615	401,044	380,252
	JUMLAH	Orang	847,811	985,417	899,516	738,326	736,526
2	GRESIK						
	NAIK	Orang	49,949	52,868	51,689	61,170	51,798
	TURUN	Orang	37,732	45,364	41,831	51,411	51,599
	JUMLAH	Orang	87,681	98,232	93,520	112,581	103,397
3	PROBOLINGGO*						
	NAIK	Orang	-	-	-	-	-
	TURUN	Orang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	Orang	-	-	-	-	-
4	TANJUNG WANGI						
	NAIK	Orang	5,252	6,648	5,483	6,381	5,189
	TURUN	Orang	3,794	5,704	4,504	4,912	4,749
	JUMLAH	Orang	9,046	12,352	9,987	11,293	9,938
TOTAL JAWA TIMUR		orang	944,538	1,096,001	1,003,023	862,200	849,861

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

* Pelabuhan Probolinggo dikhususkan sebagai pelabuhan multipurpose yang hanya melayani kegiatan bongkar muat barang sehingga tidak terdapat kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang

Harapan peningkatan daya saing Jawa Timur kedepan adalah percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura (BPWS) melalui Kerjasama Pemerintah Swasta, sehingga membuka peluang bagi pengelola Pelabuhan Internasional untuk mengikuti tender melalui mitra perusahaan lokal. Sehingga dengan skema seperti itu, diharapkan performance pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi professional, tidak *high cost* dan tidak lagi menambah utang negara,

namun bisa membuka peluang yang lebih besar bagi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan perusahaan konstruksi lokal maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang konstruksi untuk ikut dalam pembangunan proyek-proyek besar.

1.4 Arus Penumpang melalui 3 (Tiga) Bandara di Jawa Timur

Di Pulau Jawa, hanya Provinsi Jawa Timur belum mempunyai Bandara Internasional Sipil/Komersiil, sementara Bandara Enclave yang ada sangat sulit untuk dikembangkan maupun diminati oleh para investor.

Tabel 4.52
Arus Penumpang melalui 3 (Tiga) Bandara di Jawa Timur
Tahun 2010-2014

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	BANDARA JUANDA						
	INTERNASIONAL	Orang	1,217,679	1,325,863	1,505,959	1,822,690	1,735,398
	- Berangkat	Orang	569,994	603,824	734,457	901,273	878,864
	- Datang	Orang	647,685	722,039	771,502	921,417	856,534
	DOMESTIK	Orang	9,980,846	11,410,383	13,798,626	15,016,152	14,742,220
	- Berangkat	Orang	4,877,541	5,540,504	6,527,452	7,110,302	6,999,040
	- Datang	Orang	5,103,305	5,869,879	7,271,174	7,905,850	7,743,180
	JUMLAH JUANDA	Orang	11,198,525	12,736,246	15,304,585	16,838,842	16,477,618
2	BANDARA ABD. SALEH						
	DOMESTIK	Orang	363,059	463,225	509,495	525,725	626,638
	- Berangkat	Orang	178,586	230,785	253,496	259,736	311,598
	- Datang	Orang	184,473	232,440	255,999	265,989	315,040
	JUMLAH ABD. SALEH	Orang	363,059	463,225	509,495	525,725	626,638
3	BANDARA BLIMBINGSARI*						
	DOMESTIK	Orang	-	7,313	20,439	44,152	83,981
	- Berangkat	Orang	-	3,677	9,980	21,762	43,658
	- Datang	Orang	-	3,636	10,459	22,390	40,323
	JUMLAH BANYUWANGI	Orang	-	7,313	20,439	44,152	83,981
4	BANDARA NOTO HADINEGORO**						
	DOMESTIK	Orang	-	-	-	-	16,768
	- Berangkat	Orang	-	-	-	-	8,635
	- Datang	Orang	-	-	-	-	8,133
	JUMLAH NOTO HADINEGORO	Orang	-	-	-	-	16,768
TOTAL JAWA TIMUR		Orang	11,561,584	13,206,784	15,834,519	17,408,719	17,205,005

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

* launching penerbangan komersial perdana di Bandara Blimbingsari Banyuwangi adalah 29 Desember 2010.

** launching penerbangan komersial perdana di Bandara Notohadinegoro Jember pada 2014

Mengingat jumlah penumpang Bandara Juanda sudah jauh melebihi kapasitas yang seharusnya, maka bandara tersebut seharusnya sudah diperluas dari 477,3 Ha menjadi 1.000 Ha. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik daerah tentunya sangat mungkin dilakukan karena traffic-nya sudah tinggi dan yang memiliki potensi peningkatan yang tinggi dengan gambaran keuntungannya sudah lebih jelas.

Mengingat jalur penerbangan dari dan menuju Jawa Timur sudah mempunyai traffic yang jelas dengan gambaran keuntungan juga sudah jelas, maka diyakini investor yang berpengalaman mengelola Bandara Kelas Dunia akan tertarik untuk berinvestasi di Jawa Timur. Kebijakan pembangunan Bandara kedepan adalah tuntutan penyediaan infrastruktur transportasi untuk menunjang efisiensi aktivitas para pelaku bisnis.

2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tabel 4.53
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2014

NO	Sektor	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Umum	2.483	2.741	3.431	3.318	3.381
1.1.	Konvensional	2.290	2.490	3.180	3.067	3.130
1.2.	Syariah	193	251	251	251	251
2	BPR	511	549	584	595	595
2.1.	Konvensional	485	485	520	531	531
2.2.	Syariah	26	64	64	64	64
Total		2.994	3.290	4.015	3.913	3.976

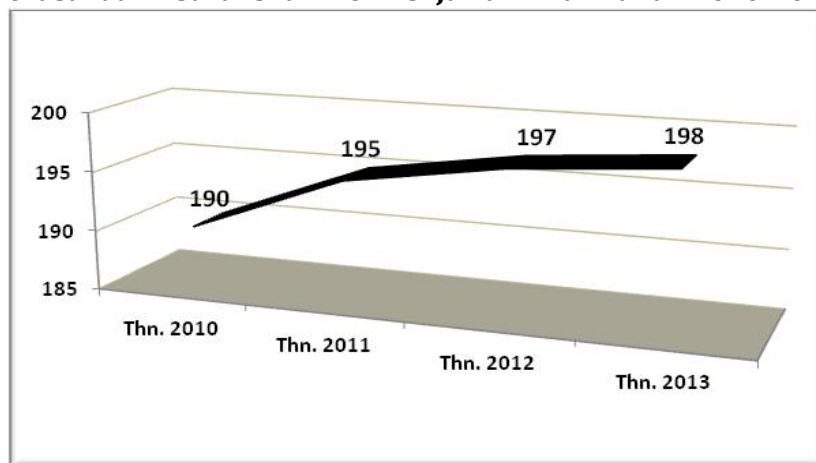
Sumber: Bank Indonesia Cabang Surabaya

Jumlah bank dan cabangnya adalah jumlah kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Semakin banyak jumlah kantor bank disuatu daerah menunjukkan bahwa daerah mempunyai potensi ekonomi yang lebih tinggi. Jumlah kantor bank di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah kantor bank Tahun 2011 naik 9,89 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu dari 2.994 kantor menjadi 3.290 kantor, selanjutnya tahun 2012 naik 22,04 persen dari 3.290 kantor menjadi 4.015 kantor. Tahun 2013 jumlah kantor bank mengalami penurunan sebesar 2,54 persen dari 4.015 kantor tahun 2012 menjadi 3.913 pada tahun 2013, kemudian tahun 2014 meningkat kembali sebesar 63 kantor bank atau 1.61%.

2.2 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Gambar 4.51
Perusahaan Asuransi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

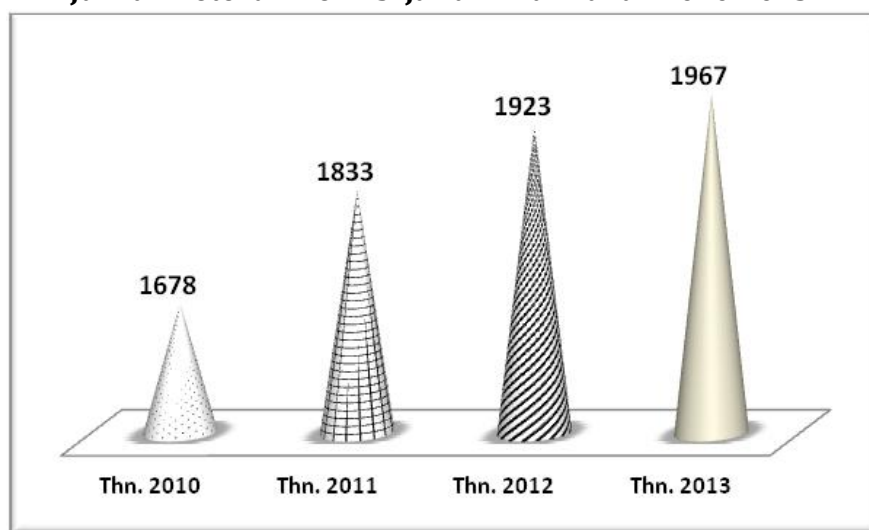
Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Jumlah perusahaan asuransi di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 setiap tahun mengalami kenaikan. Jika dilihat perkembangan empat tahun terakhir, jumlah perusahaan asuransi mengalami kenaikan 4,21 persen dari 190 perusahaan pada tahun 2010 menjadi 198 perusahaan pada tahun 2013. Semakin meningkatnya jumlah perusahaan asuransi menunjukkan kebutuhan jasa asuransi, yang merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga. Baik dalam menghadapi resiko finansial yang timbul sebagai akibat dari resiko yang paling mendasar yaitu resiko alamiah datangnya kematian maupun dalam menghadapi berbagai resiko atas harta benda yang dimiliki.

2.3 Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan

Jasa akomodasi merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur. Pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 1.967 unit yang terdiri dari 113 unit hotel berbintang (5,74 persen) dan 1.854 unit hotel non bintang (94,26 persen). Dalam kurun waktu setahun, kenaikan unit jasa akomodasi mencapai 2,29 persen atau 44 unit jasa akomodasi. Peningkatan jumlah usaha akomodasi tersebut terjadi akibat bertambahnya usaha jasa akomodasi pada klasifikasi hotel bintang sebanyak 15 unit dan hotel non bintang sebanyak 29 unit.

Gambar 4.52
Jumlah Hotel di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

3. Lingkungan Hidup

3.1 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Air merupakan salah satu dari kebutuhan dasar makhluk hidup. Air yang dikonsumsi tentunya harus memenuhi standar kesehatan seperti tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau. Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat urgent karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis.

Tabel 4.54
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013

No.	Tahun	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga
1	2010	93,73	10.483.105
2	2011	93,42	10.555.938
3	2012	94,53	10.686.958
4	2013	95,01	10.686.958

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

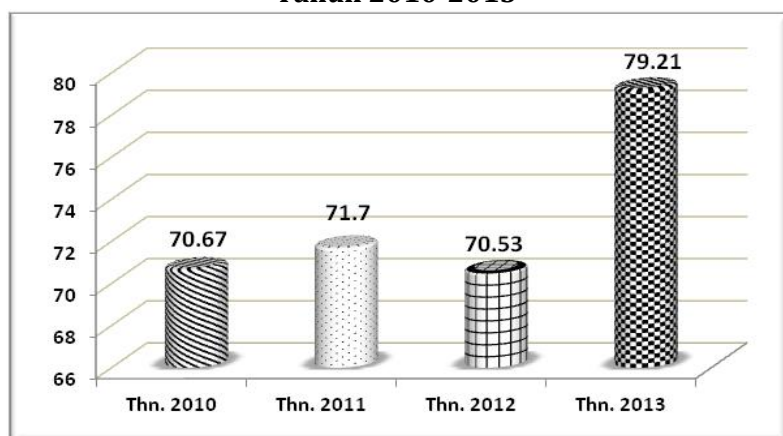
Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit. Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari, air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2010-2013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2010 sekitar 94 persen dan meningkat menjadi sekitar 95 persen di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 5 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

4. Komunikasi dan Informasi

4.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Permintaan daya listrik dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang mengenai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya di Jawa Timur.

Gambar 4.53
Rasio ketersediaan daya listrik di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pengelolaan kelistrikan di Jawa Timur dilakukan oleh BUMN seperti Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Indonesia Power dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN yang mendistribusikannya kepada masyarakat/ instansi/ perusahaan/ lembaga swasta untuk berbagai keperluan.

Kapasitas terpasang di Jawa Timur Tahun 2013 adalah sebesar 10,18 MW, sedangkan dari sisi kebutuhan listrik di Jawa Timur adalah sebesar 23.963 (MWh). Dengan demikian Ratio ketersediaan Listrik adalah sebesar 79,21 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 79 persen kebutuhan listrik sudah dikonsumsi/ dinikmati oleh berbagai pihak, baik rumah tangga, swasta, industri, instansi, lembaga perusahaan lainnya. Selebihnya sebesar 21 persen adalah ketersediaan listrik yang diusahakan sendiri (*captive power*) yang diusahakan untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat, termasuk juga yang masih dalam proses untuk bisa menikmati listrik bagi kehidupan sehari-hari.

4.2 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Pada era sekarang listrik merupakan kebutuhan pelengkap rumah tangga yang tidak bisa dielakkan, hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan tenaga listrik bahkan listrik dapat meningkatkan produktifitas penghuni rumah tersebut. Disamping itu dengan tersedianya listrik dapat meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.55
Persentase Rumah Tangga Menurut
Sumber Penerangan Utama Tahun 2010-2013

Sumber Penerangan Utama	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Listrik (PLN & Non PLN)	98.97	99.30	99.57	99.70
Non Listrik	1.03	0.70	0.43	0.30

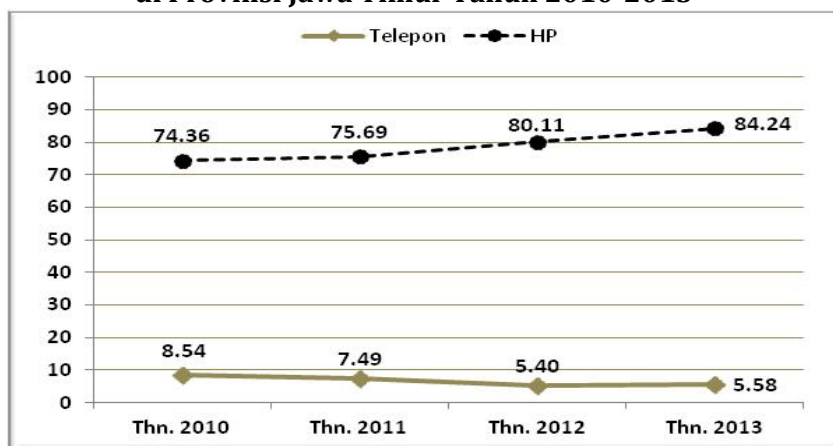
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada lima tahun terakhir (2010–2013) persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan Non PLN) terus meningkat walaupun peningkatannya kecil. Hingga tahun 2013 hampir seluruh rumah tangga di Jawa Timur (99,70 persen) bisa menikmati listrik.

4.3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Pada era modern ketersediaan alat komunikasi sangat dibutuhkan, dengan teknologi komunikasi yang ada pada saat ini berbagai informasi dari tempat lain bahkan di belahan dunia manapun sangat mudah kita peroleh. Ketersediaan teknologi komunikasi pada suatu wilayah dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa handphone (HP) dan telepon rumah biasa.

Gambar 4.54
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dalam empat tahun terakhir ini di Jawa Timur terlihat jelas rumah tangga yang menggunakan telepon genggam/HP terus meningkat. Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga yang menggunakan HP sekitar 74 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 84 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa alat komunikasi yang berupa telepon seluler menjadi suatu kebutuhan pada rumah tangga. Disisi lain untuk telepon kabel mulai tahun 2010 hingga 2012 terus menurun mulai dari 8,54 persen menjadi 5,4 persen pada tahun 2012, namun ditahun 2013 meningkat menjadi 5,58 persen. Peningkatan ini diduga karena adanya program dari PT Telkom tentang penggunaan telepon kabel untuk internet. Karena dewasa ini kebutuhan akan internet sangat tinggi sehingga banyak rumah tangga yang menggunakan telepon kabel untuk akses ke internet, seperti pake speedy yang ditawarkan oleh PT Telkom.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

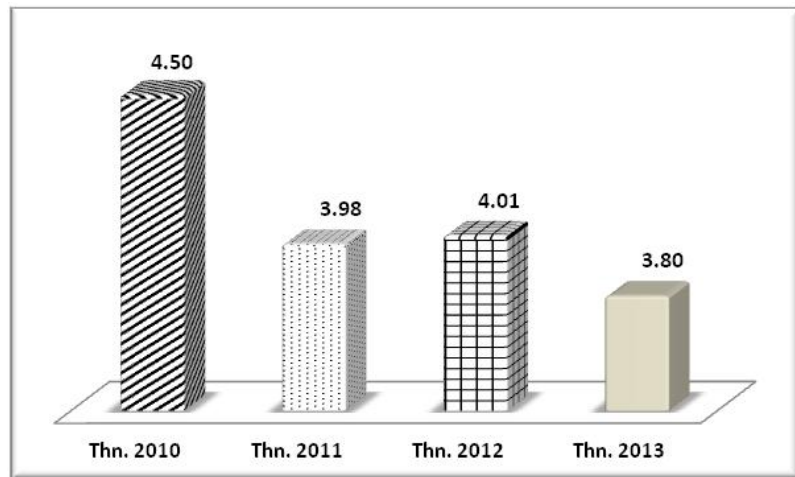
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak

kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Gambar 4.55
Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
di Jawa Timur Tahun 2010-2013



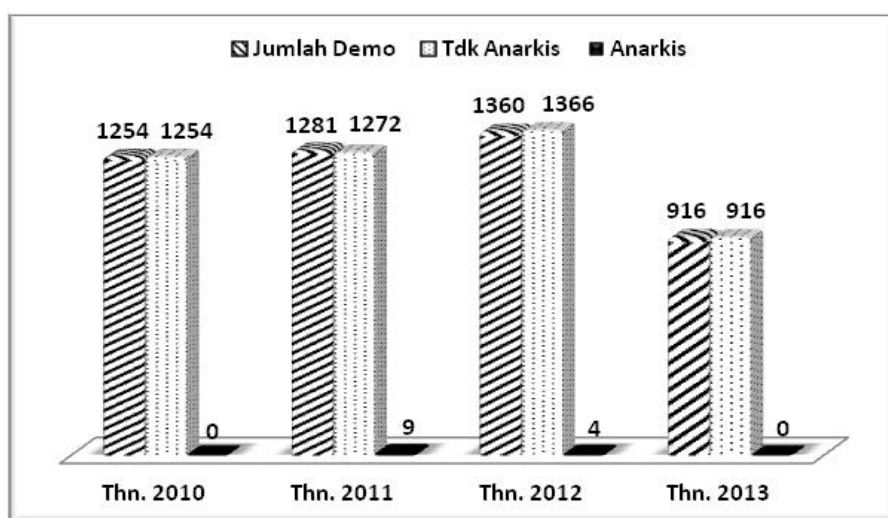
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2010-2012 angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan hingga 4,01 pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 angka kriminalitas menjadi 3,80 atau turun 0,03 poin dibandingkan tahun sebelumnya, ini berarti selama 1 tahun terakhir terjadi sedikit penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas sebesar 3,80 menunjukkan bahwa terjadi hampir 4 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

1.2. Perkembangan Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Gambar 4.56
Jumlah Demo di Jawa Timur Tahun 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Polda Jatim, banyaknya demo dari tahun 2010 sejumlah 1.254 demo terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 sejumlah 1.360 demo dan menurun di tahun 2013 menjadi 916 demo. Kejadian demo anarkhis terjadi di tahun 2011, dan 2012 masing-masing sejumlah 9 dan 4 demo anarkhis.

1.3. Lama Proses Perijinan

Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah wilayah atau daerah. Meskipun demikian, peran pemerintah daerah masih dominan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 4.56
Jumlah Izin Yang Dikeluarkan Serta Lama Waktu Penyelesaian
Menurut Kelembagaan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

No	Nama Lembaga	Jumlah Izin	Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
1.	Perencanaan Pembangunan	1	1 hari
2.	Penanaman Modal	7	1 hari
3.	Kesehatan	26	1 jam
4.	Bina Marga	1	1 hari
5.	Pengairan	2	1 hari
6.	Perhubungan dan LLAJ	56	1 hari
7.	Sosial	4	1 hari
8.	tenaga Kerja	2	1 hari
9.	Koperasi dan UMKM	6	7 hari (maksimal)
10.	Kebudayaan dan Pariwisata	5	1 hari
11.	Pertanian	3	1 hari
12.	Peternakan	14	1 hari
13.	Perikanan dan Kelautan	11	1 hari
14.	Kehutanan	7	1 hari
15.	Energi dan Sumber Daya Mineral	18	1 hari
16.	Perindustrian dan Perdagangan	10	1 hari
17.	Lingkungan Hidup	4	1 hari
JUMLAH		177	

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan di semua sektor pelayanan publik, terutama dalam kegiatan pelayanan perizinan. Upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengakhiri buruknya perizinan yang berdampak buruk terhadap kurang optimalnya investasi di Jawa Timur adalah membangun Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Dimana tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas perizinan di Jawa Timur. Sampai dengan saat ini penyelesaian proses pengajuan izin di Provinsi Jatim maksimal diselesaikan dalam waktu 17 hari.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

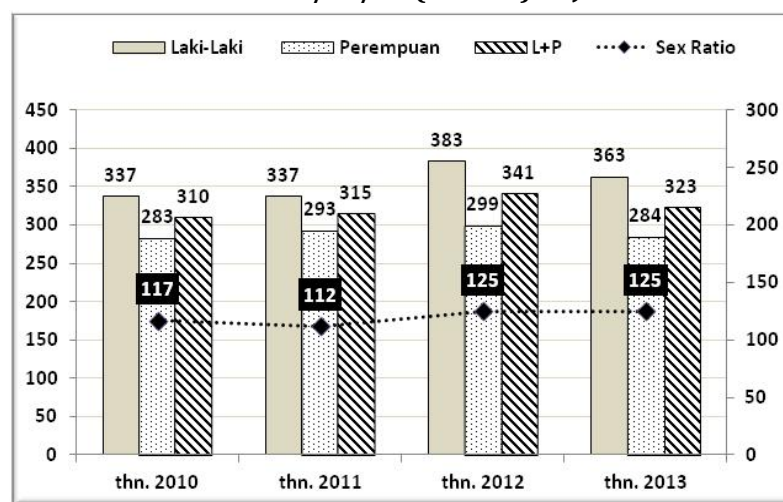
1. Ketenagakerjaan

1.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat

dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka tentunya akan semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Gambar 4.57
Rasio Lulusan S1/S2/S3 menurut Jenis Kelamin (per 10.000) dan Sex Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Persen) di Jawa Timur 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

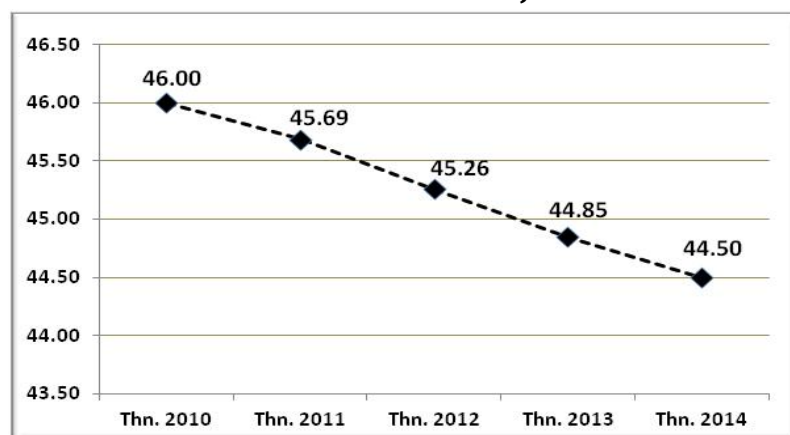
Rasio lulusan S1/S2/S3 selama 2010-2013 berkisar pada angka 300 per 10.000 penduduk, dan angkanya menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Namun pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 terjadi sedikit penurunan dari 341 menjadi 323 lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Menurut jenis kelamin, dalam rentang 2010-2013, lulusan S1/S2/S3 penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, hal ini terlihat dari angka sex rasio lulusan S1/S2/S3 nilainya diatas 100 persen. Sex ratio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2010 sebesar 117 persen menjadi 125 persen di tahun 2013.

1.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif

terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun, dan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Gambar 4.58
Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010- 2014 Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2014, angka rasio ketergantungan untuk Jawa Timur sebesar 44,50 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka rasio ketergantungan menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

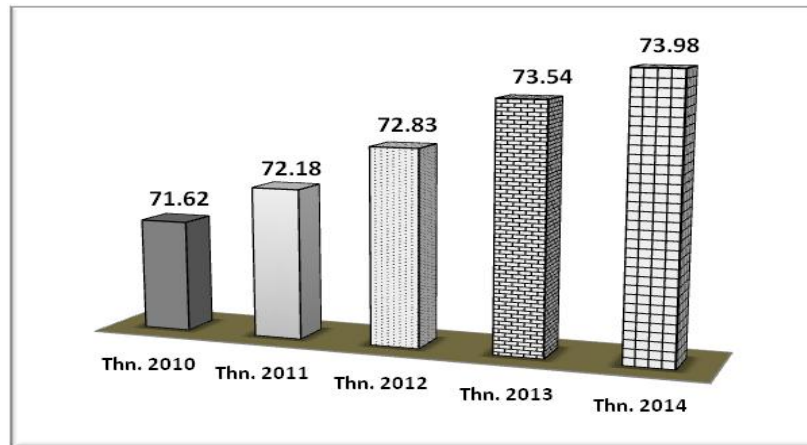
1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh

segelintir kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi juga berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Bisa dianalogikan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Seberapa jauh pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia, dapat dijelaskan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan mengevaluasi angka IPM, keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar Kab/Kota di Jatim dapat diketahui baik dari angka IPM-nya sendiri maupun dari tiga komponen pembentuknya, kesehatan (Angka Harapan Hidup, pencapaian tingkat pendidikan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Gambar 4.59
Indeks Pembangunan Manusia Jatim Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama periode tahun 2010-2014 angka IPM di Jawa Timur secara umum menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2010 nilainya 71,62, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 72,18 (2011); 72,83 (2012); 73,54 (2013); dan pada tahun 2014 mencapai 73,98. Meningkatnya IPM ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat di Jawa Timur.